



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.58, 2019

BAPETEN. Sistem Klasifikasi dan Akses Arsip Dinamis.

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah akses bagi publik dan mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak, perlu dilakukan pengaturan pengelolaan dan perlindungan terhadap arsip dinamis secara prinsip cepat, tepat, dan aman di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.Rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
4. Unit Pengolah adalah unit kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
5. Unit Kearsipan adalah pengelola arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan berada di Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan, Biro Umum.
6. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
7. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.

8. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
9. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan Klasifikasi Keamanannya.
10. Arsip Biasa adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
11. Arsip Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
12. Arsip Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro.

Pasal 2

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dimaksudkan untuk:
 - a. mendorong unit kerja agar memberkaskan Arsip Dinamis unit kerjanya secara tertib; dan
 - b. memberikan petunjuk kepada unit kerja agar mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap Klasifikasi Arsip yang telah ditetapkan.
- (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis bertujuan untuk:
 - a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan Arsip Dinamis; dan
 - b. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, dan aman.

Pasal 3

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis ini mencakup:

- a. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis;
- b. Pengamanan Arsip Dinamis; dan
- c. pengaturan Akses Arsip Dinamis.

Pasal 4

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis substantif; dan
 - b. Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis fasilitatif, meliputi:
 1. fasilitatif keuangan; dan
 2. fasilitatif kepegawaian.
- (2) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
- (3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta prosedur, sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana.

BAB II

KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 6

- (1) Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. Arsip Biasa;
 - b. Arsip Terbatas; dan
 - c. Arsip Rahasia.
- (2) Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dalam teknis pengamanan dan akses.

Pasal 7

Arsip Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 8

Arsip Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan arsip yang memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 9

Arsip Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 10

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan arsip berupa rak arsip dan lemari arsip; dan

- b. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip.
- (3) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aplikasi pengelolaan Arsip Dinamis.

BAB III PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 11

Pengamanan Arsip Dinamis dilakukan melalui pengamanan ruang simpan dan penentuan pengelola arsip.

Pasal 12

Pengamanan ruang simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa pemasangan kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan, dan media penyimpanan arsip.

Pasal 13

- (1) Pengelola Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Kearsipan, dan pengelola Arsip di unit kerja.
- (2) Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pengamanan dan penetapan hak Akses Arsip di Pusat Arsip.

Pasal 14

- (1) Pengamanan Arsip Dinamis disesuaikan dengan Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Arsip Biasa disimpan pada rak arsip.
- (3) Arsip Terbatas dan Arsip Rahasia disimpan pada lemari arsip.
- (4) Arsip Rahasia dikelola oleh Pejabat Fungsional Arsiparis.

BAB IV
PENGATURAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 15

Arsip Dinamis dapat diakses oleh pengguna internal dan pengguna eksternal.

Pasal 16

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
 - a. penentu kebijakan, mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 - b. pelaksana kebijakan, mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada dibawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa dan terbatas; dan
 - c. pengawas internal, mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna eksternal meliputi:
 - a. publik, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan tingkat Klasifikasi biasa;
 - b. pengawas eksternal, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam melaksanakan fungsi pengawasan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum.

Pasal 17

- (1) Penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan pejabat pimpinan tinggi.

- (2) Pejabat pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan pejabat administrator atau eselon III.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c merupakan auditor dari unit kerja Inspektorat.
- (4) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri atas auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.
- (5) Aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c terdiri atas aparat kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> Kebijakan yang berkaitan dengan bidang Instalasi dan Bahan Nuklir, Reaktor Daya/non Daya, Nuklir non Reaktor, Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, limbah nuklir, pengangkutan Bahan Nuklir meliputi: - Naskah akademik/Telaah kajian - Analisa data dan informasi - Kajian dan Analisa	<p style="text-align: center;">3</p> Biasa/Terbuka	<p style="text-align: center;">4</p> Umum	<p style="text-align: center;">5</p> Pejabat Administrator (Escalon III)	<p style="text-align: center;">6</p> Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	<p style="text-align: center;">7</p> DP2FRZR, DP2IBN, P2STPFRZR, P2STPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Usulan kebijakan - Rekomendasi - Rumusan dan penyusunan materi/bahan kebijakan Masukkan dan dukungan dalam Penyusunan kebijakan - Rancangan kebijakan - Penetapan dalam bentuk NSPK 					
II	PERATURAN PENGAWASAN TENAGA NUKLIR					
1	BIDANG INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR					
	a. Naskah yang berkenaan dengan kegiatan penyusunan dan penegakan peraturan keselamatan reaktor nuklir					
	Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Badan Bidang Ketenaganukliran) <ul style="list-style-type: none"> - Surat Undangan/Jadwal Rapat - Surat Pengajuan PROLEGNAS/Izin Prakarsa 	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DP2IBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notulen Rapat - SK Tim - SK PAK/L - Daftar Literatur - Dokumen Hasil Identifikasi Peraturan - Dokumen Terjemahan - Rancangan Awal Naskah Akademis - Rancangan Awal Undang-Undang 	3	4	5	6	7
b. Naskah yang berkenaan dengan kegiatan penyusunan dan penegakan peraturan keselamatan non reaktor nuklir						
	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi Peraturan BAPETEN terkait Instalasi Nuklir Non Reaktor - Surat Undangan/Jadwal Rapat - Notulen Rapat - SK Tim - SK PAK/L - Daftar Literatur - Dokumen Hasil Identifikasi Peraturan 	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escion III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DP2IBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Terjemahan - Rancangan Naskah Urgensi/Policy Paper - Draft Hasil Pembahasan Peraturan BAPETEN/Draft Final Peraturan BAPETEN - Laporan hasil Konsultasi Publik - Laporan pelaksanaan pembinaan - Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembinaan 	3	4	5	6	7
2	BIDANG FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF					
	Naskah yang berkenaan dengan kegiatan penyusunan dan pembinaan rancangan undang-undang					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dan Pembinaan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Badan Bidang Ketenaganukliran) di Bidang Penelitian dan Industri serta Kesehatan - Surat Undangan/Jadwal Rapat - Notulen Rapat 	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DP2FRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK Tim - Laporan Konsultasi Publik - Konsep Peraturan Pemerintah - Naskah Akademik - Rancangan Peraturan - Laporan Kegiatan Pembinaan - Laporan Evaluasi Pembinaan 	3	4	5	6	7
3	PENGANGKUTAN BAHAN NUKLIR					
	<p>Naskah yang berkenaan dengan kegiatan penyusunan dan pembinaan rancangan peraturan perundang-undangan</p>					
	Penyusunan dan Pembinaan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Badan terkait Ketenaganukliran) dalam bidang Pengangkutan Bahan Nuklir - Surat Undangan/Jadwal Rapat - Notulen Rapat - Surat Keputusan	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escelon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DP2FRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2 <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Konsultasi Publik - Konsep Peraturan Pemerintah - Naskah Akademik - Rancangan Peraturan Perundang-undangan - Laporan Kegiatan Pembinaan - Laporan Evaluasi Pembinaan 	3	4	5	6	7
4	LIMBAH NUKLIR					
	Naskah yang berkenaan dengan kegiatan penyusunan dan pembinaan rancangan peraturan perundang-undangan					
	Penyusunan dan Pembinaan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Badan terkait Ketenaganukliran) dalam bidang Limbah Nuklir <ul style="list-style-type: none"> - Surat Undangan/Jadwal Rapat - Notulen Rapat - Surat Keputusan - Laporan Konsultasi Publik 	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DP2FRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsep Peraturan Pemerintah - Naskah Akademik - Rancangan Peraturan Perundang-undangan - Laporan Kegiatan Pembinaan - Laporan Evaluasi Pembinaan 	3	4	5	6	7
III	PERIZINAN					
1	INSTALASI NUKLIR (REAKTOR)					
	<p>a. Persetujuan evaluasi tapak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan evaluasi tapak - Program evaluasi tapak - Sistem manajemen evaluasi tapak - Ktun persetujuan evaluasi tapak - Laporan hasil evaluasi - Laporan hasil verifikasi - Laporan evaluasi keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat)/eksternal (BPK/BPKP), dan penegak	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	b. Persetujuan desain <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan desain - Desain rinci reaktor nuklir - Laporan analisis keselamatan - KTUN Persetujuan desain - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat)/eksternal (BPK/BPKP), dan penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN
	c. Persetujuan perubahan desain <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan perubahan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan	Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	desain - Data perubahan desain Reaktor Nuklir - Laporan analisis keselamatan - KTUN persetujuan perubahan desain - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan		Tinggi, Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	(Esclon III)	pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	
	d. Persetujuan modifikasi - Permohonan modifikasi - Program modifikasi - Sistem manajemen modifikasi - KTUN persetujuan modifikasi - Laporan Hasil Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III),	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 		Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	e. Persetujuan utilisasi <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan utilisasi - Program utilisasi - Sistem manajemen utilisasi - KTUN persetujuan utilisasi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), &	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			pengak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)			
	f. Persetujuan pernyataan pembebasan <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan pernyataan pembebasan - Hasil pelaksanaan Dekomisioning - Hasil pelaksanaan penanganan limbah radioaktif - Laporan pelaksanaan izin lingkungan - Hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif di dalam dan di luar Tapeak - KTUN persetujuan pernyataan pembebasan - Laporan Hasil Evaluasi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & pengak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan <p>g. Izin tapak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin tapak - Bukti pendirian badan hukum - Bukti hak atas tanah dari kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan - Kesesuaian dengan penataan ruang - Bukti pembayaran biaya permohonan izin - Laporan pelaksanaan evaluasi tapak - Laporan pelaksanaan sistem manajemen evaluasi tapak - Daftar informasi desain tahap tapak - Data utama reaktor nuklir - Ktun izin tapak 	Terbatas	<p>Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & pengak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil evaluasi - Laporan hasil verifikasi 					
	<p>h. Izin konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin konstruksi - Bukti pendirian badan hukum - Izin mendirikan bangunan gedung fungsi khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum - Sertifikat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan - Izin usaha jasa konstruksi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum - Izin terkait penanaman modal asing dari 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti pembayaran izin konstruksi - Laporan analisis keselamatan - Batasan dan kondisi operasi - Sistem manajemen konstruksi - Daftar informasi desain tahap konstruksi - Program proteksi dan keselamatan radiasi - Sistem safeguards - Rencana proteksi fisik - Program manajemen penuaan - Program dekomisioning 					
	<ul style="list-style-type: none"> - Program konstruksi - Izin lingkungan - Laporan analisis keselamatan 	Terbatas	Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	probabilitistik - Deposito berjangka pada bank pemerintah - Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional - Cadangan akuntansi - Ktun izin konstruksi - Laporan hasil evaluasi - Laporan evaluasi keselamatan		Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)		dan fungsi BAPETEN	
	i. Perpanjangan izin konstruksi - Permohonan perpanjangan izin Konstruksi - Laporan kemajuan kegiatan Konstruksi - Program dan jadwal baru kegiatan Konstruksi - KTUN perpanjangan izin konstruksi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 		(Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	j. Izin komisioning <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin komisioning - Bukti pendirian badan hukum - Sertifikat laik fungsi bangunan dari kepala daerah - Bukti bayar izin - Laporan analisis keselamatan - Batasan dan kondisi operasi - Program komisioning - Program perawatan 	Terbatas	Pentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat)/ eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program proteksi dan keselamatan radiasi - Sistem safeguards - Rencana proteksi fisik - Sistem manajemen - Program manajemen penuaan - Program dekomisioning - Program kesiapsiagaan nuklir - Laporan pelaksanaan izin lingkungan - Laporan hasil kegiatan konstruksi - Gambar teknis reaktor nuklir terbangun - Bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir yang berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya - Bukti jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning 	<p style="text-align: center;">3</p> <p>Terbatas</p>	<p style="text-align: center;">4</p> <p>(Aparat Kepolisian, Kcjakaan, KPK)</p>	<p style="text-align: center;">5</p> <p>Pejabat Administrator (Esclon III)</p>	<p style="text-align: center;">6</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN</p>	<p style="text-align: center;">7</p> <p>DPIEN</p>

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Ktun izin komisioning - Laporan hasil evaluasi - Laporan hasil verifikasi - Laporan evaluasi keselamatan 					
	<p>k. Perpanjangan izin komisioning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan perpanjangan izin Komisioning - Laporan kemajuan kegiatan Komisioning - Program dan jadwal baru kegiatan Komisioning - KTUN perpanjangan izin komisioning - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p>2</p> <p>1. Izin operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin operasi - Bukti pendirian badan hukum - Izin usaha penyediaan tenaga listrik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dalam hal reaktor nuklir akan digunakan untuk pengusahaan tenaga listrik - Bukti biaya permohonan izin operasi - Laporan analisis keselamatan - Batasan dan kondisi operasi - Program proteksi dan keselamatan radiasi - Program perawatan - Sistem safeguards - Rencana proteksi fisik - Sistem manajemen 	<p>3</p> <p>Terbatas</p>	<p>4</p> <p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BKPP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	<p>5</p> <p>Pejabat Administrator (Esclon III)</p>	<p>6</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN</p>	<p>7</p> <p>DPIBN</p>

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Program dekomisioning - Program kesiapsiagaan nuklir - Laporan pelaksanaan izin lingkungan - KTUN izin operasi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN
	m. Perpanjangan izin operasi <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan perpanjangan izin Operasi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan	Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan analisis keselamatan - Laporan penilaian keselamatan berkala - Laporan operasi - Laporan kajian penuaan - KTUN perpanjangan izin oprasi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 		<p>Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	<p>(Esclon III)</p>	<p>pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN</p>	
	<p>n. Izin dekomisioning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin dekomisioning - Bukti pendirian badan hukum - Bukti pembayaran biaya permohonan izin - Program dekomisioning 	<p>Terbatas</p>	<p>Pentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III),</p>	<p>Pejabat Administrator (Esclon III)</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN</p>	<p>DPIBN</p>

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Program proteksi dan keselamatan radiasi - Sistem manajemen - Ktun izin dekomisioning - Laporan hasil evaluasi - Laporan hasil verifikasi - Laporan evaluasi keselamatan 		Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	<p>o. Perubahan izin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan perubahan izin Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir - Dokumen perubahan nama badan hukum Pemegang Izin Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir - Dokumen perubahan alamat reaktor nuklir - KTUN perubahan izin 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), &	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	3	4	5	6	7
2	INSTALASI NUKLIR (NON REAKTOR)					
	<p>a. Fasilitas penyimpanan lestari bahan bakar nuklir bekas</p>					
	<p>1) Persetujuan evaluasi tapak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan evaluasi tapak - Program evaluasi tapak - Sistem manajemen evaluasi tapak - KTUN persetujuan evaluasi tapak - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi 	Terbatas	<p>Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), &</p>	<p>Pejabat Administrator (Esclon III)</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN</p>	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Evaluasi Keselamatan 		<p>pengak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>			
	<p>2) Persetujuan perubahan desain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan perubahan desain - Laporan analisis keselamatan - KTUN persetujuan perubahan desain - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	<p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & pengak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3) Persetujuan modifikasi <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan modifikasi - Program modifikasi - Sistem manajemen modifikasi - KTUN persetujuan modifikasi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPJBN
	4) Persetujuan utilisasi <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan utilisasi - Program utilisasi - Sistem manajemen utilisasi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	DPJBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - KTUN persetujuan utilisasi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 		Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)		BAPETEN	
	5) Persetujuan pernyataan pembebasan <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan pernyataan pembebasan - Hasil pelaksanaan Dekomisioning - Hasil pelaksanaan penanganan limbah radioaktif - Laporan pelaksanaan izin lingkungan - Hasil pengukuran paparan radiasi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) /	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dan kontaminasi zat radioaktif di dalam dan di luar Tapak</p> <ul style="list-style-type: none"> - KTUN persetujuan pernyataan pembebasan - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 		<p>eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kopolisian, Kcjaksanaan, KPK)</p>			
	<p>6) Izin tapak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin tapak - Bukti pendirian badan hukum - Bukti hak atas tanah dari kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan - Kescesuaian dengan penataan ruang - Bukti pembayaran biaya 	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), &</p>	<p>Pejabat Administrator (Esclon III)</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN</p>	<p>DPIBN</p>

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>permohonan izin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan pelaksanaan evaluasi tapak; - Laporan pelaksanaan sistem manajemen evaluasi tapak; - Daftar informasi desain tahap tapak - Data utama reaktor nuklir. - Ktun izin tapak - Laporan hasil evaluasi - Laporan hasil verifikasi - Laporan evaluasi keselamatan 		<p>penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>			
	<p>7) Izin konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin konstruksi - Bukti pendirian badan hukum - Izin mendirikan bangunan gedung fungsi khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan 	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal</p>	<p>Pejabat Administrator (Esclon III)</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN</p>	<p>DPIBN</p>

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan - Izin usaha jasa konstruksi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum - Izin terkait penanaman modal asing dari kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal - Bukti pembayaran izin konstruksi - Laporan analisis keselamatan 		<p>(Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)</p>			

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Batasan dan kondisi operasi - Sistem manajemen konstruksi - Daftar informasi desain tahap konstruksi - Pro-am proteksi dan keselamatan radiasi - Sistem safeguards 					
	<ul style="list-style-type: none"> - Deposito berjangka pada bank pemerintah - Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; - Cadangan akuntansi - KTUN izin konstruksi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Escalon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(Aparat Kopolisian, Kcjaksanaan, KPK)			
	8) Perpanjangan izin konstruksi <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan perpanjangan izin Konstruksi - Laporan kemajuan kegiatan Konstruksi - Program dan jadwal baru kegiatan Konstruksi - KTUN perpanjangan izin konstruksi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat)/eksternal (BPK/BPKP), dan penegak hukum (Aparat Kopolisian, Kcjaksanaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN
	9) Izin komisioning <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin komisioning 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan	Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti pendirian badan hukum - Sertifikat laik fungsi bangunan dari kepala daerah - Bukti bayar izin - Laporan analisis keselamatan - Batasan dan kondisi operasi - Program komisioning - Program perawatan - Program proteksi dan keselamatan radiasi - Sistem safeguards - Rencana proteksi fisik - Sistem manajemen - Program manajemen penunaan - Program dekomisioning - Program kesiapsiagaan nuklir 		<p>Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)</p>	<p>(Esclon III)</p>	<p>pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN</p>	
		<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana</p>	<p>Pejabat Administrator (Esclon III)</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas</p>	<p>DPIBN</p>

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan pelaksanaan izin lingkungan - Laporan hasil kegiatan konstruksi - Gambar teknis reaktor nuklir terbangun - Bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir yang berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya; - Bukti jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning - Ktun izin komisioning - Laporan hasil evaluasi - Laporan hasil verifikasi - Laporan evaluasi keselamatan 		Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)		dan fungsi BAPETEN	
	10) Perpanjangan izin komisioning <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan perpanjangan izin Komisioning 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kemajuan kegiatan Komisioning - Program dan jadwal baru kegiatan Komisioning - KTUN perpanjangan izin komisioning - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN
	11) Izin operasi <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin operasi - Bukti pendirian badan hukum - Izin usaha penyediaan tenaga listrik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dalam hal reaktor nuklir akan 		Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal			

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>digunakan untuk pengusahaan tenaga listrik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti biaya permohonan izin operasi - Laporan analisis keselamatan - Batasan dan kondisi operasi - Program proteksi dan keselamatan radiasi - Program perawatan - Sistem safeguards 		<p>(Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana proteksi fisik - Sistem manajemen - Program Dekomisioning - Program kesiapsiagaan nuklir - Laporan pelaksanaan izin lingkungan - KTUN izin operasi - Laporan Hasil Evaluasi 	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) /</p>	<p>Pejabat Administrator (Esclon III)</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN</p>	<p>DPIBN</p>

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 		eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	12) Perpanjangan izin operasi <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan perpanjangan izin Operasi - Laporan analisis keselamatan - Laporan penilaian keselamatan berkala - Laporan operasi; - KTUN perpanjangan izin operasi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP 2	KLASIFIKASI KEAMANAN 3	HAK AKSES 4	PEJABAT YANG BERWENANG 5	PERTIMBANGAN 6	UNIT PENGOLAH 7
1	13) Izin dekomisioning <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin dekomisioning - Bukti pendirian badan hukum - Bukti pembayaran biaya permohonan izin - Program dekomisioning - Program proteksi dan keselamatan radiasi - Program kesiapsiagaan nuklir - Sistem manajemen - Ktun izin dekomisioning - Laporan hasil evaluasi - Laporan hasil verifikasi - Laporan evaluasi keselamatan 	Terbatas	Kepolisian, Kejaksaan, KPK) Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN
	14) Perubahan izin	Terbatas	Penentu kebijakan	Pejabat	Memiliki dampak	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan perubahan izin Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir - Dokumen perubahan nama badan hukum Pemegang Izin Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir - Dokumen perubahan alamat reaktor nuklir - KTUN perubahan izin - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	3	4	5	6	7
	<p>b. Fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi</p>					
	<ul style="list-style-type: none"> 1) Persetujuan evaluasi tapak - Persetujuan evaluasi tapak 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan)	Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan evaluasi tapak - Program evaluasi tapak - Sistem manajemen evaluasi tapak - KTUN persetujuan evaluasi tapak - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 		Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	(Esclon III)	pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	
	2) Persetujuan perubahan desain <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan perubahan desain - Data perubahan desain Reaktor Nuklir - Laporan analisis keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III),	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - KTUN persetujuan perubahan desain - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 		Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	3) Persetujuan modifikasi <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan modifikasi - Program modifikasi - Sistem manajemen modifikasi - KTUN persetujuan modifikasi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) /	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Evaluasi Keselamatan 		eksternal (BPK/BPKP), & penggak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	4) Persetujuan utilisasi <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan utilisasi - Program utilisasi - Sistem manajemen utilisasi - KTUN persetujuan utilisasi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penggak hukum (Aparat)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kpolisian, Kcjaksanaan, KPK)			
	5) Persetujuan pernyataan pembebasan <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan pernyataan pembebasan - Hasil pelaksanaan Dekomisioning - Hasil pelaksanaan penanganan limbah radioaktif - Laporan pelaksanaan izin lingkungan - Hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif di dalam dan di luar Tapak - KTUN persetujuan pernyataan pembebasan - Laporan Hasil Evaluasi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kpolisian, Kcjaksanaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kpolisian, Kcjaksanaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN
	<p>6) Izin tapak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin tapak - Bukti pendirian badan hukum - Bukti hak atas tanah dari kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan - Kesesuaian dengan penataan ruang - Bukti pembayaran biaya permohonan izin - Laporan pelaksanaan evaluasi tapak; - Laporan pelaksanaan sistem manajemen evaluasi tapak; - Daftar informasi desain tahap tapak - Data utama reaktor nuklir. 					

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Ktun izin tapak - Laporan hasil evaluasi - Laporan hasil verifikasi - Laporan evaluasi keselamatan 					
	<p>7) Izin konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin konstruksi - Bukti pendirian badan hukum - Izin mendirikan bangunan gedung fungsi khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; - Sertifikat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 	Terbatas	<p>Pentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)</p>	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>kctenagakerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izin usaha jasa konstruksi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum - Izin terkait penanaman modal asing dari kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal - Bukti pembayaran izin konstruksi - Laporan analisis keselamatan - Batasan dan kondisi operasi - Sistem manajemen konstruksi - Daftar informasi desain tahap konstruksi - Program proteksi dan keselamatan 					

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	radiasi - Sistem safeguards - Rencana proteksi fisik - Program manajemen penuaan - Program dekomisioning	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian,	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN
- Program kesiapsiagaan nuklir - Program Konstruksi - Izin Lingkungan - Laporan Analisis Keselamatan Probabilistik - Deposito berjangka pada bank pemerintah - Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional - Cadangan akuntansi - KTUN izin konstruksi						

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 		Kcjaksanaan, KPK)			
	<p>8) Perpanjangan izin konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan perpanjangan izin Konstruksi - Laporan kemajuan kegiatan Konstruksi - Program dan jadwal baru kegiatan Konstruksi - KTUN perpanjangan izin konstruksi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN
	9) Izin komisioning	Terbatas	Penentu kebijakan	Pejabat	Memiliki dampak	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin Komisioning - Bukti pendirian badan hukum - Sertifikat laik fungsi bangunan dari kepala daerah - Bukti bayar izin - Laporan analisis keselamatan - Batasan dan kondisi operasi - Program Komisioning - Program perawatan - Program proteksi dan keselamatan radiasi - Sistem Safeguards - Rencana proteksi fisik - Sistem manajemen - Program manajemen penusuan - Program Dekomisioning 		(Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)	Administrator (Esclon III)	yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Program kesiapsiagaan nuklir - Laporan pelaksanaan izin lingkungan - Laporan hasil kegiatan Konstruksi - Gambar teknis Reaktor Nuklir terbangun - Bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir yang berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya; - Bukti jaminan finansial pelaksanaan Dekomisioning - KTUN izin komisioning - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	<p>Pejabat Administrator (Eselon III)</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN</p>	<p>DPIBN</p>
	<p>10) Perpanjangan izin komisioning</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan</p>	<p>Pejabat</p>	<p>Memiliki dampak</p>	<p>DPIBN</p>

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan perpanjangan izin Komisioning - Laporan kemajuan kegiatan Komisioning - KTUN perpanjangan izin komisioning 	3	<p>4</p> <p>(Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)</p>	<p>5</p> <p>Administrator (Esclon III)</p>	<p>6</p> <p>yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN</p>	<p>7</p>
	<p>11) Izin Operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin Operasi - bukti pendirian badan hukum - izin usaha penyediaan tenaga listrik dari menteri yang menyelenggarakan 	Terbatas	<p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator</p>	<p>Pejabat Administrator (Esclon III)</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN</p>	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>urusan pemerintahan di bidang energi dalam hal Reaktor Nuklir akan digunakan untuk pengusahaan tenaga listrik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti biaya permohonan izin operasi - Laporan analisis keselamatan - Batasan dan kondisi operasi - Program proteksi dan keselamatan radiasi - Program perawatan - Sistem Safeguards - Rencana proteksi fisik - Sistem manajemen - Program Dekomisioning - Program kesiapsiagaan nuklir - Laporan pelaksanaan izin lingkungan - KTUN izin operasi 		<p>(Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kecjaksaan, KPK)</p>			

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 					
	12) Perpanjangan izin operasi <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan perpanjangan izin Operasi - Laporan analisis keselamatan - Laporan penilaian keselamatan berkala - Laporan operasi; - KTUN perpanjangan izin operasi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN
	13) Izin Dekomisioning	Terbatas	Penentu kebijakan	Pejabat	Memiliki dampak	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin Dekomisioning - bukti pendirian badan hukum - bukti pembayaran biaya permohonan izin - Program Dekomisioning - Program proteksi dan keselamatan radiasi; - Program kesiapsiagaan nuklir; - Sistem manajemen - KTUN izin dekomisioning - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	3	(Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Administrator (Esclon III)	yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	7
	14) Perubahan izin <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan perubahan izin - Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen perubahan nama badan hukum mengang Izin Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor nuklir - Dokumen perubahan alamat reaktor nuklir - KTUN perubahan izin - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 		Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & pengcak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)		BAPETEN	
3	ZAT RADIOAKTIF DAN RADIASI					
	a. Penelitian dan Industri					
	1) Evaluasi dokumen permohonan izin fasilitas penelitian dan industri <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur penilaian dokumen persyaratan izin - Instruksi kerja penilaian dokumen administrasi persyaratan izin 	Terbatas	Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III),	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Instruksi kerja penilaian dokumen teknis persyaratan izin - Dokumen penetapan tingkat layanan/ <i>service level arrangement</i> (SLA) proses penilaian permohonan izin - Laporan hasil evaluasi/penilaian permohonan izin - Laporan hasil verifikasi lapangan terkait proses perizinan - Laporan pembinaan dan bimbingan teknis proses perizinan - Arsip surat penugasan/kedinasan terkait perizinan - Petunjuk dan revisi petunjuk pelaksanaan (juklak/juknis) - Data fasilitas perizinan penelitian 	3	Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5	6	7

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dan industri</p> <p>2) Penerbitan KTUN Perizinan bidang Industri</p> <p>- Arsip KTUN Izin Pemanfaatan dan Persetujuan</p>	Terbatas	<p>Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)</p>	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPFRZR
	<p>b. Kesehatan</p> <p>1) Evaluasi dokumen permohonan izin fasilitas kesehatan</p>	Terbatas	Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan	Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu	DPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur penilaian dokumen persyaratan izin - Instruksi kerja penilaian dokumen administrasi persyaratan izin - Instruksi kerja penilaian dokumen teknis persyaratan izin - Dokumen Penetapan Tingkat Layanan/Service Level Arrangement (SLA) proses penilaian permohonan izin - Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Permohonan izin - Laporan Hasil Verifikasi Lapangan terkait Proses Perizinan - Laporan Pelaksanaan <i>On the Spot Licensing</i> (OTSL) bidang Kesehatan - Laporan Pembinaan dan Bimbingan 		Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kcpolisian, Kcjaksanaan, KPK)	(Esclon III)	pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	
		Terbatas	Penentu kebijakan	Pejabat	Memiliki dampak	DPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	Teknis Proses Perizinan - Arsip Surat Penugasan/Kedinasan terkait Perizinan - Data perizinan bidang kesehatan		(Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Administrator (Esclon III)	yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	
	2) Pencerbitan KTUN Perizinan bidang Kesehatan - Arsip KTUN Izin Pemanfaatan dan Persetujuan	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DFFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	<p>c. Pengujian dan Prosedur Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan standar pengujian Petugas Proteksi Radiasi bidang industri dan medik - Laporan Pelaksanaan Pengujian petugas proteksi radiasi (soal dan jawaban ujian lisensi Petugas Proteksi Radiasi, bahan rapat Tim Penguji, hasil ujian) - Laporan Pelaksanaan Penyebaran 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	Petugas Proteksi Radiasi (PPR) - Data Pemberitan Surat Izin Bekerja (SIB) PPR - Data Petugas ber-SIB		(BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)			
4	BAHAN NUKLIR					
	a. Izin baru/perpanjangan Pemanfaatan Bahan Nuklir (IPBN) - Pemanfaatan litbang - Permohonan IPBN - Bukti pendirian badan hukum; - Bukti pembayaran biaya IPBN - KTUN mengenai izin Konstruksi, Komisioning, operasi, atau Dekomisioning Instalasi Nuklir. - Dokumen spesifikasi teknis Bahan Nuklir - Prosedur yang terkait dengan	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIEN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> pemanfaatan Bahan Nuklir - Sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi - Pernyataan perencanaan penanganan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan limbah radioaktif - Program proteksi dan keselamatan radiasi - Rencana proteksi fisik - Sistem Safeguards - KTUN IPBN	<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">4</p> Kpolisian, Kcjaksanaan, KPK	<p style="text-align: center;">5</p>	<p style="text-align: center;">6</p>	<p style="text-align: center;">7</p>
	<p>b. Pemanfaatan: pembuatan dan produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan IPBN - Bukti pendirian badan hukum - Bukti pembayaran biaya IPBN - KTUN mengenai izin Konstruksi, Komisioning, operasi, atau 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III),	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	Dekomisioning Instalasi Nuklir. - Dokumen spesifikasi teknis Bahan Nuklir - Prosedur yang terkait dengan pemanfaatan Bahan Nuklir - Sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi - Pernyataan perencanaan penanganan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan limbah radioaktif - Program proteksi dan keselamatan radiasi - Rencana proteksi fisik - Sistem Safeguards - KTUN IPBN		Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	c. Pemanfaatan: penyimpanan dan penggunaan - Permohonan IPBN	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti pendirian badan hukum; - Bukti pembayaran biaya IPBN - Salinan KTUN mengenai izin Konstruksi, Komisioning, operasi, atau Dekomisioning Instalasi Nuklir. - Dokumen spesifikasi teknis Bahan Nuklir - Prosedur yang terkait dengan pemanfaatan Bahan Nuklir - Sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi - Pernyataan perencanaan penanganan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan limbah radioaktif - Program proteksi dan keselamatan radiasi - Rencana proteksi fisik - Sistem Safeguards 		Kebijakan (Pejabat Administrator (Escalon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksanaan, KPK)		dan fungsi BAPETEN	

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>- KTUN IPBN</p> <p>d. Pemanfaatan: pengalihan, ekspor, dan impor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan IPBN - Bukti pendirian badan hukum; - Bukti pembayaran biaya IPBN - Angka pengenal impor atau izin impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan atau dokumen notifikasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk Pemohon yang merupakan instansi pemerintah - Izin ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 	Terbatas	<p>Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksaan, KPK)</p>	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>di bidang perdagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salinan KTUN mengenai izin Konstruksi, Komisioning, oprerasi, atau Dekomisioning Instalasi Nuklir. - dokumen spesifikasi teknis Bahan Nuklir - Prosedur yang terkait dengan pemanfaatan Bahan Nuklir - Sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN
	<ul style="list-style-type: none"> - Pernyataan perencanaan penanganan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan limbah radioaktif - Program proteksi dan keselamatan radiasi - Rencana proteksi fisik - Sistem Safeguards - KTUN IPBN 					

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)			
	<p>e. Perubahan IPBN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan perubahan IPBN - Dokumen perubahan nama badan hukum Pemegang Izin; atau alamat Instalasi Nuklir; atau nama pekerja D654 ptugas proteksi radiasi, pengurus inventori Bahan Nuklir, pengawas inventori Bahan Nuklir, atau ptugas proteksi fisik; atau kuantitas Bahan Nuklir. - Bukti biaya izin perubahan IPBN - KTUN perubahan izin 	Terbatas	<p>Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian,</p>	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>f. Persetujuan impor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan impor - Konosemen (<i>air way bill/bill of lading</i>) - <i>commercial invoice</i> - Daftar pengepakan (<i>packing list</i>) - <i>shippers declaration of dangerous goods/multi modal declaration of dangerous goods</i> - pemberitahuan impor barang - Bukti bayar persetujuan impor - KTUN persetujuan impor 	<p>Terbatas</p>	<p>Kejaksanaan, KPK)</p> <p>Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksanaan Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksanaan, KPK)</p>	<p>Pejabat Administrator (Esclon III)</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN</p>	<p>DPIBN</p>
	<p>g. Persetujuan ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan ekspor - <i>Commercial invoice</i> 	<p>Terbatas</p>	<p>Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksanaan</p>	<p>Pejabat Administrator (Esclon III)</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas</p>	<p>DPIBN</p>

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar pengepakan (<i>packing list</i>) - Pemberitahuan ekspor barang - Bukti bayar persetujuan ekspor - KTUN persetujuan ekspor 		<p>Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & pengagak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)</p>		<p>dan fungsi BAPETEN</p>	
5	PENGANGKUTAN BAHAN NUKLIR					
	<p>a. Persetujuan pengiriman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan pengiriman - Rencana proteksi fisik - Rencana kontijensi - Peta dan rute pengangkutan 	Terbatas	<p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III),</p>	<p>Pejabat Administrator (Esclon III)</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN</p>	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti kelayakan kendaraan - Program proteksi radiasi selama pengangkutan - Prosedur penanggulangan kedaruratan - KTUN persetujuan pengiriman 		Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	<p>b. Persetujuan pengiriman kembali bahan bakar nuklir bekas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan pengiriman kembali Bahan Bakar Nuklir Bekas - Dokumen spesifikasi teknis Bahan Bakar Nuklir Bekas yang akan dikirim kembali - Informasi mengenai identitas penerima di negara asal dan pengirim; dan pengangkut dan moda angkutan dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), &	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p>2</p> <p>di negara asal</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistem proteksi fisik Bahan Nuklir - sistem <i>Safeguards</i>, meliputi dokumen perubahan inventori - pemindahan Bahan Nuklir (<i>inventory change document</i>) - material transfer); dan - laporan perubahan inventori (<i>inventory change report</i>). - Bukti bayar persetujuan pengiriman kembali BBNB - KTUN persetujuan pengiriman bahan bakar nuklir bekas 	3	4	5	6	7
6	SERTIFIKASI					
	a. Sertifikasi personil izin bekerja petugas instalasi dan bahan nuklir					
	<p>1) Dokumen permohonan izin bekerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan izin bekerja - Formulir permohonan izin bekerja 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana	Pejabat Administrator (Escalon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>petugas IBN yang telah diisi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salinan bukti identitas diri Petugas IBN - Salinan surat hasil pemeriksaan kesehatan umum - Salinan sertifikat lulus Pelatihan berdasarkan Kompetensi - Salinan bukti pembayaran biaya permohonan Izin Bekerja - Salinan ijazah terakhir - Salinan surat pernyataan telah melakukan magang ditandatangani pemegang izin - Salinan surat pernyataan telah melakukan bekerja ditandatangani pemegang izin 	3	<p>Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & pengak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)</p>		<p>dan fungsi BAPETEN</p>	7
	2) Dokumen penyelenggaraan Ujian	Terbatas	Penentu kebijakan	Pejabat	Memiliki dampak	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP 2	KLASIFIKASI KEAMANAN 3	HAK AKSES 4	PEJABAT YANG BERWENANG 5	PERTIMBANGAN 6	UNIT PENGOLAH 7
1	Sertifikasi - Surat tugas penyusun soal, pengawas, dan penguji, dari Kepala BAPETEN - Daftar hadir peserta ujian - Daftar hadir pengawas dan penguji - Soal ujian petugas instalasi dan bahan nuklir - Berita acara pengujian petugas instalasi dan bahan nuklir - Daftar nilai ujian tulis dan lisan - Laporan penyelenggaraan ujian		(Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)	Administrator (Esclon III)	yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	
	b. Dokumen penerbitan surat izin bekerja					
	1) Dokumen penerbitan surat izin bekerja baru - Salinan pernyataan lulus ujian kualifikasi/rekualifikasi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Evaluasi - KTUN izin bekerja 		Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)		BAPETEN	
	2) Dokumen perpanjangan izin bekerja <ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan izin bekerja - Formulir permohonan izin bekerja petugas IBN yang telah diisi - Salinan surat hasil pemeriksaan kesehatan umum - Salinan sertifikat lulus pelatihan penyetaraan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) /	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Salinan bukti pembayaran biaya permohonan Izin Bekerja - Surat keterangan lulus ujian rekualifikasi 		eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	<p>c. Sertifikasi dan Validasi Bungkus</p> <p>1) Persetujuan desain zat radioaktif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan - Sertifikat lolos uji atau Laporan Hasil Uji - Sertifikat desain zat radioaktif - Deskripsi zat radioaktif - Manual mutu proses pembuatan zat radioaktif - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Hasil Evaluasi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Persetujuan desain zat radioaktif/KTUN 		(Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)			
	2) Persetujuan desain bungkus <ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan - Sertifikat lolos uji atau Laporan Hasil Uji - Sertifikat desain bungkus - Deskripsi zat radioaktif - Manual mutu proses pembuatan zat radioaktif - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Hasil Evaluasi - Sertifikat Persetujuan desain zat radioaktif/KTUN 	Terbatas	Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN
	3) Validasi sertifikat	Terbatas	Pencentu kebijakan	Pejabat	Memiliki dampak	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan - Sertifikat atau salinan sertifikat persetujuan dari negara asal - Deskripsi Zat Radioaktif atau Bungkus - Laporan Hasil Evaluasi - Validasi Sertifikat/KTUN 	3	(Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Administrator (Esclon III)	yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	7
	4) Persetujuan kelayakan kamera radiografi <ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan - Sertifikat lolos uji atau Laporan Hasil Uji - Laporan Hasil Evaluasi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Verifikasi - Sertifikat atau KTUN 		(Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kecjaksaan, KPK)			
	<p>d. Penerbitan Sertifikat Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Penerbitan Sertifikasi Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X - Instruksi Kerja Sertifikasi Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X - Laporan Hasil Uji (LHU) - Rekaman Kendali LHU 	Terbatas	Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) /	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DKKN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Rekaman hasil pemeriksa kelengkapan - Laporan hasil pemeriksa kelengkapan - Logbook tanda terima LHU - Logbook penerimaan LHU ke TA/LEHU kembali dari TA/hasil pemeriksaan kelengkapan - Logbook piket - Laporan Evaluasi Hasil Uji (LEHU) - Sertifikasi/Notisi - Rekaman seluruh tahapan LHU diterima s.d LEHU terbit (e-doc) 		eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
e. Penunjukan Penguji/ Penyedia Ketenaganukliran	<p style="text-align: center;">Laboratorium</p> <p style="text-align: center;">Jasa Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Penunjukan Laboratorium Penguji/ Penyedia Jasa Teknis Ketenaganukliran 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III),	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DKKN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instruksi Kerja Penunjukan Laboratorium Pengujian/ Penyedia Jasa Teknis Ketenaganukliran - Laporan Evaluasi - Laporan verifikasi lapangan - Salinan KTUN Penetapan/ Penunjukan - Laporan surveilan - Laporan kinerja tahunan Pengujian - Arsip surat kedinasan - Salinan Surat Perintah/ Pakta Integritas - Rekaman seluruh tahapan penetapan/ penunjukan - pengujian/ laboratorium (e-doc) <p>f. Penunjukan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Penunjukan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran 	3	4	5	6	7
			Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
		Terbatas	Pententu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	DKKN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Instruksi Kerja Penunjukan Penunjukan Lembaga Pelatihan Ketenagakerjaan - Laporan Evaluasi - Laporan verifikasi lapangan - Salinan KTUN Penetapan/Penunjukan - Laporan surveilan - Laporan kinerja tahunan Penguji - Arsip surat kedinasan - Salinan Surat Perintah/Pakta Integritas - Rekamam seluruh tahapan penetapan/penunjukan lembaga pelatihan (e-doc) 	3	Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5	BAPETEN	7
	g. Penunjukan Lembaga Sertifikasi <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Penunjukan Lembaga Sertifikasi - Instruksi Kerja Penunjukan Lembaga Sertifikasi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DKKN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Evaluasi - Laporan verifikasi lapangan - Salinan KTUN Penetapan/Penunjukan - Laporan survilans - Arsip surat kedinasan Rekamam Seluruh tahapan penetapan/penunjukan lembaga sertifikasi (e-doc) 	3	(Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5	6	7
	<p>b. Sertifikasi Tenaga Ahli</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Sertifikasi tenaga ahli - Instruksi Kerja Sertifikasi tenaga ahli - Soal uji sertifikasi tenaga ahli - Hasil Uji sertifikasi tenaga ahli - Bahan ajar sertifikasi tenaga ahli - Arsip surat kedinasan - Rekamam seluruh tahapan sertifikasi 	Terbatas	Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DKKN

NO.	JENIS ARSIP 2	KLASIFIKASI KEAMANAN 3	HAK AKSES 4	PEJABAT YANG BERWENANG 5	PERTIMBANGAN 6	UNIT PENGOLAH 7
1	person (e-doc) i. Uji Profisiensi <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Uji Profisiensi - Instruksi Kerja Uji Profisiensi - Protokol Uji Profisiensi - Lembar kerja uji profisiensi - Hasil Uji Profisiensi (peserta) - Hasil uji stabilitas dan penentuan nilai acuan (penyenggara) - Jadwal uji profisiensi - Arsip surat kedinasan - Rekamam seluruh tahapan uji profisiensi (e-doc) 	Terbatas	(BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DKKN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4 Kejaksanaan, KPK)	5	6	7
7	REEKSPOR ZAT RADIASI/SUMBER RADIASI LAINNYA					
	<ul style="list-style-type: none"> - Data teknis sumber radioaktif yang akan direkspor - Data pelaksanaan pengangkutan terkait reekspor 	Terbatas	Pentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksanaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DFFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
8	KETEKNIKAN					
	<p>a. Pengelolaan Alat Ukur Radiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manual/Instruksi Kerja Pengoperasian Peralatan - Rekamannya peminjaman/pengembalian Alat Ukur Radiasi - Sertifikat kalibrasi/ dokumen kalibrasi untuk alat yang dikalibrasi internal - Arsip dokumen kalibrasi - Logbook perawatan alat - Logbook kondisi ruangan penyimpanan alat - Data teknis Alat Ukur Radiasi - Dokumen/Rekaman Data Hibah/Pengadaan Alat Ukur Radiasi - Rekaman Surat Dinas Peminjaman Alat 	Terbatas	<p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)</p>	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DKKN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Ukur Radiasi</p> <p>b. Laboratorium Keteknikan (Lingkungan, Safeguard, Security)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Akreditasi Laboratorium Pengujian - Prosedur laboratorium lingkungan, safeguard dan security - Instruksi kerja laboratorium lingkungan, safeguard dan security - Logbook kondisi ruangan laboratorium - Sertifikat kalibrasi/ dokumen kalibrasi untuk alat yang dikalibrasi internal - Rekam Surat Dinas Permohonan Uji Sampel - Dokumen Pengelolaan/ pengujian sampel - Laporan Hasil Uji Sampel <p>c. Implementasi Keamanan Nuklir Nasional</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	<p>Pejabat Administrator (Eselon III)</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN</p>	<p>DKKN</p>
		<p>Terbatas</p>	<p>Pencentu kebijakan</p>	<p>Pejabat</p>	<p>Memiliki dampak</p>	<p>DKKN</p>

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Bimbingan Teknis Keamanan Nuklir - Laporan Koordinasi terkait Keamanan Nuklir Nasional - Laporan Hasil Pemantauan/Verifikasi/Implementasi Keamanan Nuklir - Informasi/Laporan Keamanan Nuklir dari instansi terkait 		(Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)	Administrator (Esclon III)	yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	
IV	REVIEW DAN PENILAIAN KESELAMATAN NUKLIR					
1	KESELAMATAN REAKTOR					

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p align="center">2</p> <p>a. Standar Keselamatan Instalasi Nuklir Pelaksanaan pengkajian keselamatan INSTALASI NUKLIR</p>	3	4	5	6	7
	<p>1) Pelaksanaan Pengkajian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat menyurat dengan stakeholder - Notulen pembahasan kegiatan - KAK survey lapangan - Data teknis primer/sekunder - Laporan survey lapangan - Laporan hasil kajian 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPIBN
	<p>2) Penyusunan Pedoman Teknis</p>	Terbatas	Penentu kebijakan	Pejabat	Memiliki dampak	P2STPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2 - Surat menyurat dengan stakeholder - Notulen pembahasan draft kajian Teknis - KAK survey lapangan - Laporan survey lapangan - Pedoman teknis	3	4 (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & pengak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5 Administrator (Esclon III)	6 yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	7
b. Standar Keselamatan Reaktor						
	1) Pelaksanaan pengkajian keselamatan reaktor - Pengkajian simulasi reaktor. - Prosedur, Pedoman dan Instruksi	Terbatas	Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Teguran keterlambatan penyampaian Laporan operasi instalasi reaktor nuklir - Laporan operasi instalasi reaktor nuklir - Laporan hasil evaluasi (LHE) operasi instalasi reaktor nuklir - Notulen 	3	<p>Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & pengagak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	5	BAPETEN	7
	<p>2) Evaluasi pengkajian standar keselamatan dalam disain dan operasi, penerapan budaya keselamatan, pengumpulan data kecelakaan nuklir dan non nuklir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permintaan evaluasi - pelaksanaan evaluasi - Laporan evaluasi 	Terbatas	<p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) /</p>	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
c. Keselamatan Deterministik						
Naskah yang berkenaan dengan kegiatan pelaksanaan pengkajian dan analisis keselamatan deterministik antara lain:						
	1) Pelaksanaan Pengkajian <ul style="list-style-type: none"> - Surat menyurat dengan stakeholder - Notulen pembahasan kegiatan - KAK survey lapangan - Data teknis primer/sekunder - Laporan survey lapangan - Laporan hasil kajian 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), &	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STFIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	2) Penyusunan Pedoman Teknis <ul style="list-style-type: none"> - Surat menyurat dengan stakeholder - Notulen pembahasan draft pedoman - KAK survey lapangan - Laporan survey lapangan - Pedoman Teknis 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
d. Keselamatan Probabilistik						
Naskah yang berkenaan dengan kegiatan pelaksanaan pengkajian dan analisis keselamatan probabilitistik antara lain:						
	<p>1) Pelaksanaan Pengkajian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat menyurat dengan stakeholder - Notulen pembahasan kegiatan - KAK survey lapangan - Data teknis primer/sekunder - Laporan survey lapangan - Laporan hasil kajian 	Terbatas	<p>Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & pengak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2) Penyusunan Pedoman Teknis <ul style="list-style-type: none"> - Surat menyurat dengan stakeholder - Notulen pembahasan draft pedoman - KAK survey lapangan - Laporan survey lapangan - Pedoman teknis 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPIBN
e. Keselamatan Radiasi, Personil dan Lingkungan Berkas yang berkenaan dengan kegiatan pelaksanaan pengkajian dan analisis keselamatan lingkungan antara lain:						

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>1) Pelaksanaan Pengkajian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat menyurat dengan stakeholder - Notulen pembahasan kegiatan - KAK survey lapangan - Data teknis primer/sekunder - Laporan survey lapangan - Laporan hasil kajian 	Terbatas	<p>Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)</p>	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPIBN
	<p>2) Penyusunan Pedoman Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat menyurat dengan stakeholder - Notulen pembahasan draft pedoman - KAK survey lapangan 	Terbatas	Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	P2STPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan survey lapangan - Pedoman teknis 		Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)		BAPETEN	
	f. Safeguard dan Security 1) Pelaksanaan Pengkajian <ul style="list-style-type: none"> - Surat menyurat dengan stakeholder - Notulen pembahasan kegiatan - KAK survey lapangan - Data teknis primer/ skunder 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan survey lapangan - Laporan hasil kajian 		(Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	2) Penyusunan Pedoman Teknis <ul style="list-style-type: none"> - Surat menyurat dengan stakeholder - Notulen pembahasan draft pedoman - KAK survey lapangan - Laporan survey lapangan - Draft Pedoman teknis 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>g. Pengelolaan dan Penggunaan Komputasi Penunjang Pengkajian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Log book meminjaman alat ukur radiasi 2) Dokumen perpanjangan lisensi software 3) Laporan hasil analisis dengan komputasi 	<p>Terbatas</p>	<p>(Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p> <p>Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & pengagak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	<p>Pejabat Administrator (Esclon III)</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN</p>	<p>P2STPFRZR</p>

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
V	REVIEW KESELAMATAN RADIASI, PERSONIL DAN FASILITAS RADIASI					
1	KESELAMATAN RADIASI					
	a. Pelaksanaan Pengkajian <ul style="list-style-type: none"> - Surat menyurat dengan stakeholder - Notulen pembahasan kegiatan - KAK survey lapangan - Data teknis primer/sekunder - Laporan hasil kajian 	Terbatas	Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPFRZR

NO.	JENIS ARSIP 2	KLASIFIKASI KEAMANAN 3	HAK AKSES 4	PEJABAT YANG BERWENANG 5	PERTIMBANGAN 6	UNIT PENGOLAH 7
1	<p>b. Penyusunan Pedoman Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat menyurat dengan stakeholder - Notulen pembahasan draft pedoman - KAK survey lapangan - Laporan survey lapangan - Draft Pedoman teknis 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPFRZR
	<p>c. Pembinaan/Pertemuan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat menyurat terkait pelaksanaan kegiatan - KAK pembinaan/pertemuan teknis 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	P2STPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Notulen pembahasan program pembinaan - Hasil evaluasi penyclenggaraan pembinaan - Laporan penyclenggaraan pembinaan 	3	Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5	BAPETEN	7
	d. Pengelolaan dan Penggunaan Peralatan Penunjang Pengkajian <ul style="list-style-type: none"> - Log book peminjaman alat - Sertifikat kalibrasi - Hasil perawatan alat - Hasil cek antara - Surat menyurat terkait pengelolaan dan penggunaan alat 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) /	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	e. Telaah dan Kajian Dokumen Permohonan Perijinan, Dokumen Peraturan & Dokumen Inspeksi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>f. Pelaksanaan Keselamatan Radiasi</p> <p>Pelaksanaan pengkajian keselamatan radiasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisis dan evaluasi keselamatan radiasi. 2) Baku Tingkat Radioaktivitas di Lingkungan 3) Laporan Pengelolaan Limbah Radioaktif 	Terbatas	Kpolisian, Kcjaksanaan, KPK) Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kpolisian, Kcjaksanaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	1. P2STPFRZ R 2. DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
2	KESELAMATAN PERSONIL					
	<p>Naskah yang berkenaan dengan kegiatan pengkajian/analisis, penyusunan pedoman teknis dan pembinaan teknis terkait keselamatan pekerja radiasi, pasien, dan masyarakat antara lain:</p>					
	<p>a. Pelaksanaan Pengkajian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat menyurat dengan stakeholder - Notulen pembahasan kegiatan - KAK survey lapangan - Data teknis primer/sekunder - Laporan survey lapangan - Laporan hasil kajian 	Terbatas	Pententu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPFRZR
	<p>b. Penyusunan Pedoman Teknis</p>	Terbatas	Pententu kebijakan	Pejabat	Memiliki dampak	P2STPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Surat menyurat dengan stakeholder - Notulen pembahasan draft pedoman - KAK survey lapangan - Laporan survey lapangan - Draft Pedoman teknis 		(Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Administrator (Esclon III)	yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	
	c. Pembinaan/Pertemuan Teknis <ul style="list-style-type: none"> - Surat menyurat terkait pelaksanaan kegiatan - KAK pembinaan/pertemuan teknis - Notulen pembahasan program pembinaan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil evaluasi penyelenggaraan pembinaan - Laporan penyelenggaraan pembinaan 	3	(Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & pengagak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)	5	6	7
	<p>d. Pengelolaan dan Penggunaan Peralatan Penunjang Pengkajian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Log book peminjaman alat - Sertifikat kalibrasi - Hasil perawatan alat - Hasil cek antara - Surat menyurat terkait pengelolaan dan penggunaan alat 	Terbatas	Pencntu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	<p>e. Pelaksanaan Keselamatan Personil / Proteksi Radiasi Keselamatan Radiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur, Pedoman dan Instruksi Kerja - Surat Tindak Lanjut Evaluasi Dosis - Surat Pemanggilan Dosis Berlebih - Surat Teguran keterlambatan penyampaian Laporan Pemantauan Dosis Pekerja Radiasi - Laporan Hasil Uji Pemantauan Dosis Pekerja Radiasi - LHE Pemantauan Dosis Pekerja Radiasi 	Terbatas	Pentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian,	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kajian Penyebab Terjadinya Kejadian (KPK) - Laporan hasil pemanggilan Dosis Berlembih - Laporan Hasil Evaluasi (LHE) KPK - Notulen Rapat Pemantauan Dosis Pekerja Radiasi 	3	4 Kejaksaaan, KPK)	5	6	7
3	KESELAMATAN FASILITAS RADIASI					
<p>Naskah yang berkenaan dengan kegiatan pengkajian/analisis, penyusunan pedoman teknis dan pembinaan teknis terkait keselamatan fasilitas radiasi, antara lain:</p>						
<p>a. Pelaksanaan Pengkajian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat menyurat dengan stakeholder - Notulen pembahasan kegiatan - KAK survey lapangan - Data teknis primer/sekunder - Laporan survey lapangan - Laporan hasil kajian 						
<p>Terbatas</p>		<p>Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) /</p>		<p>Pejabat Administrator (Eselon III)</p>		<p>P2STPFRZR</p>
<p>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN</p>						

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	b. Penyusunan Pedoman Teknis <ul style="list-style-type: none"> - Surat menyurat dengan stakeholder - Notulen pembahasan draft pedoman - KAK survey lapangan - Laporan survey lapangan - Draft Pedoman teknis - Pedoman teknis 	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPFRZR
	c. Pembinaan/Pertemuan Teknis <ul style="list-style-type: none"> - Surat menyurat terkait pelaksanaan kegiatan - KAK pembinaan/pertemuan teknis 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	P2STPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Notulen pembahasan program pembinaan - Hasil evaluasi penyclenggaraan pembinaan - Laporan penyclenggaraan pembinaan 	3	Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5	BAPETEN	
	d. Pengelolaan dan Penggunaan Peralatan Penunjang Pengkajian <ul style="list-style-type: none"> - Log book peminjaman alat - Sertifikat kalibrasi - Hasil perawatan alat - Hasil cek antara alat ukur - Surat menyurat terkait pengelolaan dan penggunaan alat 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) /	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4 eksternal (BPK/BPKP), & penggak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksanaan, KPK)	5	6	7
4	KESELAMATAN LINGKUNGAN					
	Berkas yang berkenaan dengan kegiatan pelaksanaan pengkajian dan analisis keselamatan lingkungan antara lain: - Hasil pemantauan RDMS (<i>Real Data Monitor System</i>) dalam bentuk soft file - Hasil pemantauan RDMS (<i>Real Data Monitor System</i>) dalam bentuk hard file	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
VI	INSPEKSI					
1	INSTALASI NUKLIR (REAKTOR)					
	Naskah yang berkenaan dengan kegiatan inspeksi pada Reaktor Nuklir antara lain:					
	a. Inspeksi Keselamatan reaktor nuklir					
	1) Perencanaan inspeksi keselamatan reaktor nuklir <ul style="list-style-type: none"> - Jadwal Inspeksi - Surat izin personel - Surat perintah inspeksi (SPI) - Surat pemberitahuan inspeksi (SBI) - Surat peminjaman alat - Notulen pra inspeksi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>2) Proses kegiatan inspeksi keselamatan reaktor nuklir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur, Pedoman dan Instruksi Kerja - Form Isian Hasil Inspeksi 	Terbatas	Kepolisian, Kejaksaan, KPK Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN
	<p>3) Laporan hasil inspeksi reaktor nuklir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Pemberitahuan Hasil Inspeksi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan	Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> (SBHI) - Laporan Hasil Inspeksi (LHI) - Laporan Eksekutif (LARE)/Memo Hasil Inspeksi - Notulen pasca inspeksi	<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">4</p> Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & pengagak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	<p style="text-align: center;">5</p> (Esclon III)	<p style="text-align: center;">6</p> pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	<p style="text-align: center;">7</p>
	<p>b. Inspeksi Safeguard</p> 1) Perencanaan kegiatan Inspeksi Safeguards pada reaktor nuklir - Jadwal Inspeksi - Surat izin personel - Surat perintah inspeksi (SPI)	<p style="text-align: center;">Terbatas</p>	<p style="text-align: center;">Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator</p>	<p style="text-align: center;">Pejabat Administrator (Esclon III)</p>	<p style="text-align: center;">Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN</p>	<p style="text-align: center;">DIIBN</p>

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Surat pemberitahuan inspeksi (SBI) - Surat peminjaman alat - Notulen pra inspeksi 		(Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	2) Proses Kegiatan Inspeksi bahan nuklir dan protokol tambahan pada reaktor nuklir <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur, Pedoman dan Instruksi Kerja - Form Isian Hasil Inspeksi 	Terbatas	Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>3) Pelaporan kegiatan inspeksi bahan nuklir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Pemberitahuan Hasil Inspeksi (SBHI) - Laporan Hasil Inspeksi (LHI) - Notulen pasca inspeksi - Laporan bahan Nuklir Kc IAEA - Dokumen Daftar Informasi Desain (DIQ) Fasilitas - Deklarasi Protokol Tambahan Kc IAEA 	<p>Terbatas</p>	<p>Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)</p>	<p>Pejabat Administrator (Esclon III)</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN</p>	<p>DIIBN</p>

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4 Kejaksaan, KPK)	5	6	7
c. Inspeksi Proteksi Fisik						
	1) Perencanaan Kegiatan Inspeksi Proteksi Fisik pada reaktor nuklir <ul style="list-style-type: none"> - Jadwal Inspeksi - Surat izin personel - Surat perintah inspeksi (SPI) - Surat pemberitahuan inspeksi (SBI) - Surat peminjaman alat - Notulen pra inspeksi 	Terbatas	Pententu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> 2) Proses Kegiatan Inspeksi Proteksi Fisik pada reaktor nuklir <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur, Pedoman dan Instruksi Kerja - Dokumen Ancaman Dasar Desain - Dokumen Rencana Proteksi Fisik Fasilitas - Form Isian Hasil Inspeksi - Dokumen Evaluasi Rencana Proteksi Fisik - Form Isian Hasil Inspeksi 	3	4	5	6	7
	3) Pelaporan kegiatan inspeksi proteksi fisik pada reaktor nuklir <ul style="list-style-type: none"> - Surat Pemberitahuan Hasil Inspeksi (SBHI) 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Inspeksi (LHI) Proteksi Fisik - Notulen pasca inspeksi 	3	4	5	6	7
2	INSTALASI NUKLIR NON REAKTOR (INNR)					
	a. Inspeksi Keselamatan Instalasi nuklir non reaktor					
	1) Perencanaan inspeksi nuklir non reaktor	Terbatas	Pententu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas	DIIBN
	- Jadwal Inspeksi					
	- Surat izin personel					

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Surat perintah inspeksi (SPI) - Surat pemberitahuan inspeksi (SBI) - Surat peminjaman alat - Notulen pra inspeksi 		Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)		dan fungsi BAPETEN	
	2) Proses kegiatan inspeksi nuklir non reaktor <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur, Pedoman dan Instruksi Kerja - Form Isian Hasil Inspeksi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	3) Laporan hasil inspeksi nuklir non reaktor - Surat Pemberitahuan Hasil Inspeksi (SBHI) - Laporan Hasil Inspeksi (LHI) - Laporan Eksekutif (LARE)/Memo Hasil Inspeksi - Notulen pasca inspeksi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4 (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)	5	6	7
	<p>b. Inspeksi Safeguard</p> <p>1) Perencanaan kegiatan Inspeksi Safeguards pada Instansi Nuklir Non Reaktor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jadwal Inspeksi - Surat izin personel - Surat perintah inspeksi (SPI) - Surat pemberitahuan inspeksi (SBI) - Surat peminjaman alat - Notulen pra inspeksi 	Terbatas	Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Kpolisian, Kcjaksanaan, KPK)</p> <p>Pentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kpolisian, Kcjaksanaan, KPK)</p>	Terbatas	Kpolisian, Kcjaksanaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN
	<p>2) Proses Kegiatan Inspeksi bahan nuklir dan protokol tambahan pada Instalasi Nuklir Non Reaktor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur, Pedoman dan Instruksi Kerja - Form Isian Hasil Inspeksi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan (Pejabat Pimpinan	Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu	DIIBN
	<p>3) Pelaporan kegiatan inspeksi bahan nuklir pada Instalasi Nuklir Non Reaktor</p>	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan	Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Pemberitahuan Hasil Inspeksi (SBHI) - Laporan Hasil Inspeksi (LHI) - Notulen pasca inspeksi - Laporan bahan Nuklir Ke IAEA - Dokumen Daftar Informasi Desain (DIQ) Fasilitas - Deklarasi Protokol Tambahan Ke IAEA 	<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">4</p> <p>Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	<p style="text-align: center;">5</p> <p>(Esclon III)</p>	<p style="text-align: center;">6</p> <p>pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN</p>	<p style="text-align: center;">7</p>
c. Inspeksi Proteksi Fisik						
	<p>1) Perencanaan Kegiatan Inspeksi Proteksi Fisik pada Instalasi Nuklir Non Reaktor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jadwal Inspeksi 	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana</p>	<p>Pejabat Administrator (Esclon III)</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas</p>	<p>DIIBN</p>

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Surat izin personel - Surat perintah inspeksi (SPI) - Surat pemberitahuan inspeksi (SBI) - Surat peminjaman alat - Notulen pra inspeksi 		Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)		dan fungsi BAPETEN	
	2) Proses Kegiatan Inspeksi Proteksi Fisik pada Instalasi Nuklir Non Reaktor <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur, Pedoman dan Instruksi Kerja - Dokumen Ancaman Dasar Desain - Dokumen Rencana Proteksi Fisik Fasilitas 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Evaluasi Rencana Proteksi Fisik - Form Isian Hasil Inspeksi 		(Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	3) Pelaporan kegiatan inspeksi proteksi fisik pada Instalasi Nuklir Non Reaktor <ul style="list-style-type: none"> - Surat Pemberitahuan Hasil Inspeksi (SBHI) - Laporan Hasil Inspeksi (LHI) Proteksi Fisik - Notulen pasca inspeksi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4 (Aparat Kepolisian, Kecjaksaan, KPK)	5	6	7
d. Inspeksi Keselamatan Lingkungan						
	1) Perencanaan Kegiatan Inspeksi Keselamatan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> - Jadwal Inspeksi - Surat izin personel - Surat perintah inspeksi (SPI) - Surat pemberitahuan inspeksi (SBI) - Surat peminjaman alat - Notulen pra inspeksi 	Terbatas	Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>2) Proses Kegiatan Inspeksi Keselamatan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur, Pedoman dan Instruksi Kerja - Surat Pemberitahuan Pemantauan Lingkungan/ TENORM/ Rona Awal - Surat Tugas Pemantauan Lingkungan/TENORM/ Rona Awal - Surat Teguran keterlambatan penyampaian Laporan Pemantauan Lingkungan - Laporan Pemantauan Lingkungan - LHE Laporan Pemantauan Lingkungan - Laporan Hasil Pemantauan (LHP) Lingkungan/TENORM/ Rona Awal 	Terbatas	<p>Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p> <p>Pentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Peminjaman alat pemantauan Lingkungan/TENORM/ Rona Awal - Sertifikat hasil analisa sampel lingkungan/TENORM/ Rona Awal - Form Isian Hasil Inspeksi <p>3) Pelaporan kegiatan inspeksi Keselamatan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Pemberitahuan Hasil Inspeksi (SBHI) - Laporan Hasil Inspeksi Keselamatan Lingkungan - Notulen rapat kegiatan pemantauan lingkungan/TENORM/Rona Awal 	Terbatas	<p>Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian,</p>	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4 Kejaksaan, KPK)	5	6	7
3	INSPEKSI FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF (IFRZR)					
	a. Penelitian dan Industri					
	1) Perencanaan Inspeksi fasilitas Penelitian dan Industri antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Surat Izin Inspektur - Surat Peminjaman Alat - Jadwal Inspeksi - Surat Pemberitahuan Inspeksi - Laporan Keselamatan Fasilitas - Notulen Pra Inspeksi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektoral) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>2) Proses Kegiatan Inspeksi fasilitas Penelitian dan Industri antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Form Isian Hasil Inspeksi - Surat Perintah Inspeksi - Surat Perintah Inspeksi - Surat Perintah Inspeksi - Surat Perintah Inspeksi - Surat Perintah Inspeksi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIFRZR
	<p>3) Pelaporan kegiatan Inspeksi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Inspeksi - Surat Pemberitahuan Hasil Inspeksi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	DIFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>4) Pembinaan fasilitas penelitian dan industri antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notulen pembahasan program pembinaan - Hasil evaluasi penyelenggaraan pembinaan - Laporan penyelenggaraan pembinaan 	<p>Terbatas</p>	<p>Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	<p>Pejabat Administrator (Esclon III)</p>	<p>BAPETEN</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN</p>	<p>DIFRZR</p>

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	5) Pengagan hukum fasilitas penelitian dan industri antara lain: - Surat Teguran - Surat Peringatan 1 - Surat Peringatan 2 - Putusan Pengadilan - Rekomendasi Tim Gelar Perkara	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektoral) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4 Kopolisian, Kejaksaan, KPK)	5	6	7
b. Kesehatan						
	1) Perencanaan Inspeksi fasilitas kesehatan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Surat Izin Inspektur - Surat Peminjaman Alat - Jadwal Inspeksi - Surat Pemberitahuan Inspeksi - Laporan Keselamatan Fasilitas - Notulen Pra Inspeksi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kopolisian,	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>2) Proses Kegiatan Inspeksi fasilitas kesehatan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Form Isian Hasil Inspeksi - Surat Perintah Inspeksi 	Terbatas	<p>Kejaksanaan, KPK)</p> <p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & pengagak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksanaan, KPK)</p>	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIFRZR
	<p>3) Laporan Kegiatan Inspeksi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Inspeksi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan	Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu	DIFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>- Surat Pemberitahuan Hasil Inspeksi</p>		<p>Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	<p>(Esclon III)</p>	<p>pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN</p>	
	<p>4) Pembinaan fasilitas kesehatan antara lain: - Notulen pembahasan program pembinaan - Hasil evaluasi penyelenggaraan pembinaan</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III),</p>	<p>Pejabat Administrator (Esclon III)</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN</p>	<p>DIFRZR</p>

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan penyalenggaraan pembinaan 		Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	5) Pengawasan hukum fasilitas kesehatan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Surat Teguran - Surat Peringatan 1 - Surat Peringatan 2 - Putusan Pengadilan - Rekomendasi Tim Gelar Perkara 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), &	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4 penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5	6	7
c. Sistem Manajemen						
	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Perencanaan Inspeksi - Prosedur Pelaksanaan Inspeksi - Prosedur Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Inspeksi - Prosedur Penegakan Hukum - Prosedur Penilaian Kinerja Fasilitas - Prosedur Evaluasi Penyelenggaraan Inspeksi - Prosedur Tata Kelola Inspektur 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Instruksi Kerja pelaksanaan inspeksi pasca LKF - Instruksi Kerja pembuatan LHI melalui BALIS INFARA - Instruksi Kerja pembuatan LARE - Instruksi Kerja perencanaan inspeksi - Instruksi Kerja kegiatan inspeksi - Instruksi Kerja tindak lanjut hasil inspeksi - Instruksi kerja evaluasi pelaksanaan Inspeksi - Laporan Tahunan Kegiatan Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif 	Terbatas	<p>(Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)</p> <p>Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)</p>	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
VII	KESIAPSIAGAAN NUKLIR					
1	GLADI KEDARURATAN					
	<ul style="list-style-type: none"> - Arsip surat kedinasan terkait pelatihan - Laporan pelaksanaan kegiatan - Dokumen skenario latihan - Dokumen evaluasi latihan - Notulen hasil rapat pembahasan skenario, koordinasi latihan dan evaluasi - Rekaman berupa video dan soft file 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & pengak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DKKN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
2	KEGIATAN TANGGAP DARURAT <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur, Pedoman dan Instruksi Kerja - Informasi/laporan kedaruratan dari masyarakat/pemegang ijin - Arsip surat kedinasan verifikasi kedaruratan - Rencana tanggap darurat - Laporan pelaksanaan tanggap darurat 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DKKN
3	PENGEMBANGAN SATUAN TANGGAP DARURAT (STD)					

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Logbook piket personel STD - Rekamam pemeriksaan kesehatan anggota STD - Laporan latihan penanggulangan kecelakaan - Dokumen pengembangan pelatihan satuan tanggap darurat 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DKKN
4	PENGLOLAAN INFRASTRUKTUR TANGGAP DARURAT					
	<ul style="list-style-type: none"> - Logbook perawatan kondisi ruang komando - Logbook perawatan peralatan tanggap 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan	Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu	DKKN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>darurat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Kalibrasi peralatan tanggap darurat - Hasil pemantauan RDMS (<i>Real Data Monitor System</i>)/RPM (<i>soft file</i>) - Hasil pemantauan RDMS (<i>Real Data Monitor System</i>)/RPM (<i>hard file</i>) 		<p>Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & pengagak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	(Esclon III)	<p>pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN</p>	

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
I. PERENCANAAN						
1	POKOK-POKOK KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN					
	a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP
	b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Master Plan (RPJP)					
	c. Rencana Strategis					
2	PROGRAM KERJA TAHUNAN					
	a. Usulan Unit Kerja beserta data pendukung	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP
	b. Usulan BAPETEN					
	c. Program Kerja Tahunan Unit Kerja					
	d. Program Kerja Tahunan BAPETEN					

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
3	PENETAPAN / KONTRAK KERJA					
	a. Kepala BAPETEN b. Pimpinan Unit Kerja	Biasa /Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escelon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP
4	LAPORAN					
	a. Laporan Insidental	Terbatas	Umum	Pejabat Administrator (Escelon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP
	b. Laporan Berkala 1) Laporan Bulanan Unit Kerja 2) Laporan Triwulanan Unit Kerja	Biasa /Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escelon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bagian Program & Anggaran - BP

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>3) Laporan Semesteran Unit Kerja 4) Laporan Tahunan Unit Kerja 5) Laporan Tahunan BAPETEN</p>	<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">4</p>	<p style="text-align: center;">5</p>	<p style="text-align: center;">6</p> <p>kinerja BAPETEN</p>	<p style="text-align: center;">7</p>
	<p>c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1) LAKIP Unit Kerja 2) LAKIP BAPETEN</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	<p>Pejabat Administrator (Eselon III)</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN</p>	<p>Bagian Program & Anggaran - BP</p>

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
5	EVALUASI PROGRAM					
	a. Evaluasi Program Unit Kerja b. Evaluasi Program BAPETEN	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Esclon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP
II. HUKUM						
1	Program Legislasi a. Bahan/materi program legislasi nasional dari BAPETEN b. Program legislasi BAPETEN	Terbatas	Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat) /	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Hukum - BHO

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4 eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5	6	7
2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan a. Rancangan Undang-undang dan atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan b. Rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan c. Rancangan Peraturan/Keputusan/ Instruksi Presiden, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Hukum - BHO

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2 diundangkan	3	4	5	6	7
3	Peraturan Kepala BAPETEN (mulai dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum)	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Hukum - BHO
4	Keputusan/Ketetapan Pimpinan BAPETEN (rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum) a. Keputusan Kepala BAPETEN b. Keputusan Pejabat eselon I/II	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Hukum - BHO
5	Instruksi/surat edaran (mulai dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum) a. Instruksi/Surat Edaran Kepala BAPETEN b. Instruksi/Surat Edaran Pejabat Escalon I/II	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Hukum - BHO
6	Surat Perintah a. Surat Perintah Kepala BAPETEN	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang	Seluruh Bagian di

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2 b. Surat Perintah pejabat setingkat Eselon I, II, III, IV	3	4	5 (Eselon III)	6 menggangu kinerja BAPETEN	7 Kesettamaan
7	Standar/pedoman/prosedur kerja/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang bersifat nasional/regional/internasional, termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja BAPETEN	Bagian Hukum - BHO & Bagian Organisasi dan Tata Laksana - BHO
8	Pedoman Penyelenggaraan Persidangan dan Rapat BAPETEN	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja BAPETEN	Bagian Hukum - BHO
9	Nota Kespahaman/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri	Terbatas	Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang menggangu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Kerja Sama - BP

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
10	Dokumentasi Hukum (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan-peraturan yang dijadikan referensi)	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Esclon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Hukum - BHO
11	Sosialisasi/penyuluhan/pembinaan hukum a. Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum b. Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Esclon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Hukum - BHO

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2 Penyuluhan Hukum	3	4	5	6	7
12	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Berkas tentang pemberian bantuan/konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Hukum - BHO
13	Kasus/sengketa hukum a. Pidana	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat	Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu	Bagian Hukum - BHO

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>1) Proses verbal mulai dari penyidikan sampai dengan vonis</p> <p>2) Berkas pembelaan dan bantuan hukum</p> <p>3) Telaah hukum dan opini hukum</p> <p>b. Perdata Berkas tentang kasus/sengketa perdata:</p> <p>1) Proses verbal mulai dari penyidikan sampai dengan vonis</p> <p>2) Berkas pembelaan dan bantuan hukum</p> <p>3) Telaah hukum dan opini hokum</p> <p>c. Tata Usaha Negara Berkas tentang kasus/sengketa Tata Usaha Negara:</p> <p>1) Proses verbal mulai dari penyidikan sampai dengan vonis</p> <p>2) Berkas pembelaan dan bantuan hukum</p> <p>3) Telaah hukum dan opini hukum</p>	3	<p style="text-align: center;">4</p> <p>Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BKPP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	5 (Esclon III)	<p style="text-align: center;">6</p> <p>pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN</p>	7

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>d. Arbitrase Berkas tentang kasus/sengketa arbitrase: 1) Proses verbal mulai dari penyclidikan sampai dengan vonis 2) Berkas pembelaan dan bantuan hukum 3) Telaah hukum dan opini hukum</p>	<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">4</p>	<p style="text-align: center;">5</p>	<p style="text-align: center;">6</p>	<p style="text-align: center;">7</p>
14	<p>Perijinan Berkas perijinan sejak permohonan sampai dengan diterbitkannya surat ijin</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Pencntu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum</p>	<p>Pejabat Administrator (Esclon III)</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN</p>	<p>Bagian Hukum - BHO</p>

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
15	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) a. Hak Cipta b. Hak Paten 1) Paten Biasa 2) Paten Sederhana c. Design Industri d. Design Tata Letak Sirkuit Terpadu	Terbatas	(Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK) Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Hukum - BHO

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
III. ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN						
1	Struktur Organisasi a. Pembentukan b. Pengubahan c. Pembubaran	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Ortala - BHO

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
2	Uraian Jabatan dan Tata Kerja	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Ortala - BHO
3	Evaluasi Badan	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Ortala - BHO
4	Standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Ortala - BHO
IV. KEARSIPAN						
1	Administrasi persuratan a. Buku Agenda b. Lembar Pengantar / Buku Ekspedisi c. Formulir/catatan permintaan dan layanan	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	penggandaan dokumen/Arsip					
2	Penyimpanan dan pemeliharaan arsip a. Daftar Arsip b. Pemeliharaan arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi) c. Daftar pencarian arsip	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum
3	Layanan Arsip (peminjaman dan penggunaan arsip)	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum
4	Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum
5	Penyusutan Arsip a. Pemindahan arsip in aktif 1) Berita Acara Pemindahan	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana	Pejabat Administrator (Escalon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p>2) Daftar Arsip yang Dipindahkan</p> <p>b. Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna</p> <p>1) Berita Acara Pemusnahan</p> <p>2) Daftar Arsip yang Dimusnahkan</p> <p>3) Rekomendasi/pertimbangan/pemusnahan arsip dari instansi terkait</p> <p>4) Surat Keputusan Pemusnahan</p> <p>c. Penyerahan arsip statis</p> <p>1) Berita Acara Serah Terima Arsip</p> <p>2) Daftar Arsip yang Diserahkan</p>	3	4 Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5	6	7
6	<p>Pembinaan Kearsipan</p> <p>a. Apresiasi/Sosialisasi/penyuluhan/kearsipan/lokakarya/workshop</p> <p>b. Bimbingan Teknis</p> <p>c. Supervisi dan monitoring</p>	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
V. KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHANTANGAN						
1	Telekomunikasi Administrasi penggunaan/langganan peralatan telekomunikasi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kcbijakan (Pejabat Administrator (Escelon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & pengagak hukum	Pejabat Administrator (Escelon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Rumah Tangga & Pengamanan - BU
2	Perjalanan Dinas	Terbatas	Penentu	Pejabat	Memiliki dampak	Bagian

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	a. Dalam Negeri b. Luar Negeri		kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Administrator (Esclon III)	yang mengganggu kinerja BAPETEN	Keuangan - Biro Umum
3	Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dan fasilitas kantor lainnya	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Esclon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Rumah Tangga & Pengamanan -

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7 BU
4	Risalah/Notulen Rapat a. Rapat Pimpinan b. Rapat Staf	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum
5	Administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Keuangan -

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5 (Esclon III)	6 mengganggu kinerja BAPETEN	7 Biro Umum
6	Pengurusan kendaraan dinas a. Pengurusan surat-surat kendaraan dinas b. Pemeliharaan dan perbaikan c. Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Rumah Tangga & Pengamanan - BU
7	Pemeliharaan gedung dan taman	Terbatas	Penentu	Pejabat	Memiliki dampak	Bagian

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>a. Pertamanan/landscaping b. Penghijauan c. Perbaikan gedung d. Perbaikan rumah dinas/wisma e. Kebersihan gedung dan taman</p>	3	4 kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5 Administrator (Esclon III)	6 yang mengganggu kinerja BAPETEN	7 Rumah Tangga & Pengamanan - BU
8	Pengelolaan jaringan listrik, air, telepon dan komputer a. Perbaikan/pemeliharaan b. Pemasangan	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Rumah Tangga & Pengamanan -

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			BU
9	Ketertiban dan keamanan a. Pengamanan, penjagaan dan pengawasan terhadap pejabat, kantor dan rumah dinas: 1) Daftar Nama Satuan Pengamanan 2) Daftar Jaga/Daftar Piket 3) Catatan gangguan/pelanggaran/kejadian 4) Surat Ijin keluar masuk orang atau barang	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)),	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Rumah Tangga & Pengamanan - BU

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
10	b. Laporan Ketertiban dan Keamanan 1) Kehilangan 2) Kerusakan 3) Kecelakaan 4) Gangguan Administrasi pengelolaan parkir	3 Terbatas	4 Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK) Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal	5 Pejabat Administrator (Esclon III)	6 Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	7 Bagian Rumah Tangga & Pengamanan - BU

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
11	Administrasi pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, dan pegawai lainnya	Terbatas	(BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK) Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Rumah Tangga & Pengamanan - BU

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)			
VI. HUBUNGAN MASYARAKAT						
1	Keprotokolan a. Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar) b. Buku Tamu c. Agenda kegiatan Pimpinan BAPETEN d. Kunjungan dinas dalam dan luar negeri 1) Kunjungan dinas Kepala BAPETEN 2) Kunjungan dinas Eselon I 3) Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai e. Daftar nama/alamat kantor/pejabat	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Humas Dan Protokol - BHO
2	Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan, dan peristiwa-peristiwa bidang	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Humas Dan Protokol -

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	masing-masing, dalam berbagai media: kertas/foto/video/rekaman suara/multimedia 1) Kepala BAPETEN 2) Eselon I 3) Pejabat lain/pegawai			(Eselon III)	mengganggu kinerja BAPETEN	BHO
3	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi ke-Badan-an a. Kliping koran b. Broseur/leaflet/poster/plakat c. Pengumuman/pemberitaan	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Humas Dan Protokol - BHO
4	Hubungan antar badan negara dan badan pemerintahan/instansi a. Hubungan antar badan pemerintah	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Kerja Sama - BP

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4 (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kecjaksaan, KPK)	5	6	7
b.	Hubungan dengan organisasi sosial/LSM	Terbatas	Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat) /	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Kerja Sama - BP

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
c.	Hubungan dengan perusahaan	Terbatas	Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Kerja Sama - BP

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4 (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5	6	7
	d. Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah	Terbatas	Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Kerja Sama - BP

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	e. Hubungan dengan perguruan tinggi/skolah mengenai magang, pendidikan sistem ganda (PSG)/praktek kerja lapangan (PKL)	Terbatas	Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Kerja Sama - BP
	f. Forum kehumasan (Bakohumas/Perhumas)	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Esclon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bagian Humas Dan Protokol - BHO

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					kinerja BAPETEN	
g.	Hubungan dengan media massa 1) Siaran pers/konferensi pers/press release/wawancara 2) Kunjungan wartawan/peliputan	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Esclon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Humas Dan Protokol - BHO
5	Dokumen persidangan dan Rapat (Bahan Sidkab, Rapat Terbatas, Rakor Tingkat Badan, RDP DPR/DPD RI, Pidato Kepala BAPETEN)					
a.	Bahan sidang kabinet	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bahan sidang kabinet

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4 (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5	6	7
	b. RDP DPR/DPD RI	Terbatas	Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bahan sidang kabinet

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Rakor Tingkat Badan termasuk hasil rumusan dan transkrip	Terbatas	Pententu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bahan sidang kabinet
	d. Bahan rapat terbatas Badan	Terbatas	Pententu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi),	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bahan sidang kabinet

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	c. Pidato Kepala BAPETEN	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bahan sidang kabinet
	f. Bahan Pidato Kcnegaraan Presiden Bidang Pengawasan Tenaga Nuklir	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang	- Bagian Program

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				(Esclon III)	mengganggu kinerja BAPETEN	dan Anggaran-BP - Bagian Data dan Informasi - BP
6	Penerbitan majalah, buletin, koran dan jurnal	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Esclon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Data dan Informasi - BP
7	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Esclon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Data dan Informasi - BP
8	Pameran/sayembara/lomba/festival/pembuatan spanduk dan iklan	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Esclon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bagian Humas Dan Protokol - BHO

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
9	Penghargaan/tanda kenang-kenangan Administrasi pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan kepada masyarakat yang memiliki jasa prestasi besar	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Esclon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Humas Dan Protokol - BHO
10	Ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, permohonan maaf	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Esclon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Humas Dan Protokol - BHO
VII. KEPUSTAKAAN						
1	Penyimpanan deposit bahan pustaka a. Bukti penerimaan koleksi bahan pustaka deposit b. Administrasi pengelolaan deposit bahan pustaka	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Esclon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Data dan Informasi - BP
2	Pengadaan dan pengolahan bahan pustaka a. Buku induk koleksi b. Daftar buku terseleksi	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Esclon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bagian Data dan Informasi - BP

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Daftar buku dalam pemesanan d. Daftar buku dan permintaan e. Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah deposit, hibah f. Daftar pengiriman bahan pustaka surplus g. Lembar Kerja Pengolahan BP (Buram, Pengkatalogan) h. <i>Shelf List</i> /Jajaran Kartu Utama (<i>master list</i>) i. Daftar Tambahan Buku (<i>Assesion List</i>) j. Daftar/jajaran kendali (subyek dan pengarang)				kinerja BAPETEN	
VIII. TEKNOLOGI INFORMASI						
	1. Rencana Strategis/master plan pembangunan Sistem Informasi (SIM)	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator	Pejabat Administrator (Escalon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Data dan Informasi - BP

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	2. Dokumentasi Arsitektur dan Implementasi a. Sistem Informasi b. Sistem Aplikasi c. Infrastruktur	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat) /	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Data dan Informasi - BP

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	3. Perekaman dan pmutakhiran data a. Formulir Isian b. Daftar Petugas Perekaman c. Jadwal Pelaksanaan d. Laporan hasil perekaman dan pmutakhiran data	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Data dan Informasi - BP
	4. Migrasi sistem aplikasi dan data a. Pencanaan migrasi b. Pelaksanaan migrasi c. Bcrite Acara Kegiatan Migrasi d. Daftar sistem aplikasi dan data yang dimigrasi	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Data dan Informasi - BP

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Laporan Hasil Migrasi					
	5. Dokumen hosting a. Formulir permintaan hosting b. Laporan hasil uji kelayakan c. Laporan pelaksanaan hosting	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Esclon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Data dan Informasi - BP
	6. Layanan back-up data digital	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Esclon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Data dan Informasi - BP
IX. PENGAWASAN						
	1. Rencana Pengawasan a. Rencana strategis pengawasan b. Rencana kerja tahunan c. Rencana dan penetapan kinerja tahunan d. Rakor pengawasan tingkat nasional	Terbatas	Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)),	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Inspektorat

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	2. Pelaksanaan Pengawasan					
	a. 1) Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan hasil Pemeriksaan(LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut 2) Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Escion III)), Pengawas internal (Inspektorat) /	Pejabat Administrator (Escion III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Inspektorat

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	<p>b. 1) Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan hasil Pemeriksaan(LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak memerlukan tindak lanjut</p> <p>2) Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut</p>	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Escion III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum	Pejabat Administrator (Escion III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Inspektorat

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p> <p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektoral) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	Terbatas	<p>Pejabat Administrator (Eselon III)</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN</p>	Inspektoral	
	<p>c. Laporan perkembangan penanganan surat pengaduan masyarakat</p> <p>d. Laporan pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan</p> <p>e. Laporan Perkembangan Barang Milik Negara</p> <p>f. Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Badan</p> <p>g. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)</p>					

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
X. PERLENGKAPAN						
	1. Rencana Kebutuhan Barang a. Unit Kerja b. Badan	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Rumah Tangga & Pengamanan - BU
	2. Pengadaan Barang a. Telaahan lelang/pemilihan/penunjukan langsung b. Dokumen Lelang 1) Barang Inventaris Kantor/barang bergerak (penawaran pengumuman pemenang, daftar rekanan, sampai dengan kontrak dan scrah terima barang 2) Barang Investasi (penawaran pengumuman pemenang, daftar rekanan, sampai dengan kontrak dan scrah terima	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Rumah Tangga & Pengamanan - BU

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2 barang	3	4	5	6	7
	3. Penyimpanan barang dan distribusi a. Penyimpanan inventaris kekayaan negara 1) Surat bukti barang masuk 2) Surat bukti pengeluaran barang b. Pendistribusian 1) Surat Jalan	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Peleaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Rumah Tangga & Pengamanan - BU
	4. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) a. SIMAK BMN	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat	Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu	Bagian Rumah

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	(Esclon III)	pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Tangga & Pengamanan - BU
	b. Pembukuan BMN 1) Daftar Barang Kuasa/Pengguna 2) Kartu Identitas Barang 3) Buku Penerimaan PNB	Terbatas	Pententu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bagian Rumah Tangga & Pengamanan -

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)		BAPETEN	BU
	c. Daftar Barang Ruangan (DBR)	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Esclon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Rumah Tangga & Pengamanan - BU
	d. Inventarisasi BMN 1) Keputusan Pembentukan Tim	Terbatas	Pentu kebijakan (Pejabat	Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu	Bagian Rumah

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> 2) Rencana kerja pelaksanaan inventarisasi 3) Kerta Kerja Inventarisasi 4) Berita Acara Inventarisasi 5) Daftar Inventaris/Buku Barang/ daftar barang lainnya 6) Laporan Hasil Inventarisasi	3	4	5	6	7
	c. Laporan BMN 1) Laporan Kondisi Barang 2) Laporan Barang Kuasa Pengguna 3) Berita Acara Rckonsiliasi Eksternal dan Internal	Terbatas	Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	(Esclon III)	pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Tangga & Pengamanan - BU
			Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Rumah Tangga & Pengamanan - BU

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	4) Laporan Persediaan Habis Pakai 5) Laporan Persediaan Tidak Habis Pakai		Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)			
XI. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
	1. Pedoman-pedoman kediklatan	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Esclon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Balai Diklat
	2. Kurikulum-kurikulum diklat	Terbatas	Pententu kebijakan (Pejabat	Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu	Balai Diklat

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	(Esclon III)	pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	
	3. Modul-modul diklat	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Esclon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Balai Diklat

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	4. Panduan Fasilitator	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Balai Diklat
	5. Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Balai Diklat
	6. Notulen sosialisasi/rcpat koordinasi kebijakan diklat	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Balai Diklat
	7. Akreditasi Lembaga Diklat a. Surat Permohonan Akreditasi b. Laporan Verifikasi lapangan c. Berita Acara Rapat Verifikasi d. Berita Acara Rapat Tim Penilai	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat	Pejabat Administrator (Escalon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Balai Diklat

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Surat keputusan Penetapan Akreditasi f. Sertifikat Akreditasi g. Laporan Akreditasi Lembaga Diklat		Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)			
	8. Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kearsipan a. Surat Permohonan Sertifikasi b. Laporan Verifikasi lapangan c. Berita Acara Rapat Verifikasi d. Berita Acara Rapat Tim Penilai e. Surat keputusan Penetapan Sertifikasi f. Sertifikat Sertifikasi g. Laporan Sertifikasi Lembaga Diklat	Terbatas	Pententu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kcbijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Balai Diklat

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	9. Sistem Informasi Diklat a. Iembaga diklat b. Data prasarana diklat c. Data sarana diklat d. Data pengelola diklat e. Data penyelenggara diklat f. Data widyaiswara g. Data program diklat	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Balai Diklat

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	10. Registrasi Sertifikasi/STTPL Peserta Diklat a. Surat permohonan kode registrasi b. Buku registrasi c. Surat penyampaian kode registrasi	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Balai Diklat
	11. Rencana Tahunan Diklat	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Balai Diklat
	12. Rencana penyelenggaraan diklat	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Balai Diklat
	13. Penyelenggaraan diklat a. Surat pemanggilan peserta b. Surat Keputusan Tim Penyelenggara Diklat c. Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Balai Diklat

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>d. Panduan Diklat e. Laporan panitian penyelenggara diklat f. Sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat g. Daftar Peserta Diklat h. Daftar Hadir Widyaiswara i. Bahan ajar diklat j. Daftar Hadir Peserta Diklat k. Hasil formulasi evaluasi peserta diklat l. Sertifikasi/STTPL m. Sambutan penutupan diklat</p>	3	4	5	6	7
	14. Laporan penyelenggaraan diklat	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Balai Diklat

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	15. Evaluasi penyelenggaraan diklat	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kcbijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Balai Diklat
	16. Evaluasi alumni pasca diklat	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi),	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan	Balai Diklat

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4 Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)	5	6 fungsi dan tugas BAPETEN	7

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF KEUANGAN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
A	RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (RAPBN) DAN RUU APBN-P 1. Penyusunan RAPBN a. Kebijakan Umum, RENSTRA, Strategis dan Prioritas - Dokumen Rencana Strategis atas Rencana Kerja Jangka Panjang atau Rencana Kerja Lima Tahun - Dokumen Rencana Kerja Tahunan BAPETEN b. Dokumen Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintah (RAKIP) dan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) c. Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2 Instansi Pemerintah (RASKIP)	3	4	5	6	7
	2. Penyampaian RAPBN kepada DPR-RI a. Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Undang-undang APBN - Nota Keuangan - Materi RAPBN dari Lembaga Negara dan Badan Pemerintah (LNBP) b. Pembahasan RAPBN oleh Komisi DPR c. Risalah Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI - Tanggapan masing-masing Fraksi - Jawaban pemerintah atas tanggapan Fraksi-fraksi d. Nota Jawaban DPR-RI terkait dengan pembahasan RUU APBN (Per Komisi)	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP
	3. Undang-undang Anggaran Pendapatan dan	Biasa /	Umum	Pejabat	Tidak memiliki	Bagian

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2 Belanja Negara (APBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	3 Terbuka	4	5 Administrator (Esclon III)	6 dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	7 Program & Anggaran - BP
	4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional kegiatan (POK) dan Revisinya mulai dari usulan, notulen sampai dengan penetapan DIPA, POK dan revisinya	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Esclon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP
	5. Usulan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (RUU APBN-P)	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	6. Notulen pembahasan RUU APBN-P oleh Pemerintah dan DPR	Terbatas	(BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK) Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Peleaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p> <p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian,</p>	Terbatas	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP	
	<p>7. Notulen Rapat Paripurna Persetujuan RUU APBN-P:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanggapan masing-masing fraksi - Jawaban Pemerintah atas tanggapan fraksi-fraksi 					

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kejaksanaan, KPK)			
	8. Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (UU APBN-P)	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escelon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP
	9. Keputusan Presiden tentang Rincian APBN-P	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escelon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP
	10. Nota Jawaban DPR-RI terkait dengan Pembahasan RUU APBN-P (Per Komisi)	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escelon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP
B	PELAKSANAAN KEGIATAN					

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2 1. Ketentuan/Peraturan Menteri Keuangan menyangkut pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Anggaran	3 Terbatas	4 Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Escion III), Pengawas internal (inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5 Pejabat Administrator (Escion III)	6 Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	7 Bagian Keuangan - Biro Umum
	2. Dokumen Realisasi Pendapatan a. Surat Setoran Pajak (SSP) b. Surat Setoran Bea dan Cukai (SSBC) c. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat)	Pejabat Administrator (Escion III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>d. Bukti Sisa Anggaran Lebih atau Bukti Sisa Pengembalian Belanja</p> <p>c. Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank</p> <p>f. Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari masing-masing Satuan Kerja</p> <p>g. Dokumen Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Pajak meliputi Pajak Bumi dan bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH), Pasal 25, 29, 21</p> <p>h. Piutang Negara</p> <p>i. Pengelolaan Investasi</p> <p>j. Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara</p>	3	<p>4</p> <p>Administrator (Escalon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	5	6	7
3. Belanja	<p>a. Dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa termasuk dokumen-dokumen</p> <p>1) Barang Habis Pakai</p> <p>2) Barang Inventaris:</p>	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Administrasi (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan	Pejabat Administrator (Escalon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p data-bbox="500 1629 524 1667">2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barang Bergerak/Barang Inventaris - Tanah dan Bangunan - Jasa - Software Komputer <p data-bbox="695 1340 719 1871">Catatan: yang termasuk dokumen pengadaan barang dan jasa antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumuman Lelang - Dokumen Prakuualifikasi - Dokumen Peninjauan Lapangan - Berita Acara Penjelasan Pekerjaan - Berita Acara Pelclangan - Usulan calon pemenang - Penetapan Pemenang - Surat Perintah Kerja (SPK) - Kontrak/Addendum Kontrak <p data-bbox="1182 1490 1206 1903">b. Dokumen Pembayaran Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan kebutuhan penarikan kas 	3	4 (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5	6 BAPETEN	7

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti-bukti tagihan dari pihak ke tiga - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) - Surat Perintah Membayar (SPM) - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) c. Dokumen Tata Usaha Anggaran d. Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur/Honorarium e. Kartu Gaji f. Bukti setor iuran/kontribusi pemerintah RI kepada Badan/Organisasi Internasional g. Dokumen penyertaan modal pemerintah h. Dokumen pembayaran hutang negara antara lain tagihan dari negara kreditur, bukti transfer, nota debet dari Bank Indonesia, dll 	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> i. Dokumen Akuntansi Keuangan - Berita Acara Pemeriksaan Kas - Kas/Registec Penutupan Kas - Arsip Data Komputer (ADK) - Berita Acara Rekonsiliasi antara Satuan 	Terbatas	Pembantu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2 Kerja dan KPPN j. Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari: - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Neraca - Laporan Arus Kas - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	3	4 (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5	6 BAPETEN	7
C	BANTUAN/PINJAMAN LUAR NEGERI					
	1. Daftar proyek-proyek yang akan dibiayai dari pinjaman Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4 Administrator (Eselon III), Pegawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5	6	7
	2. Dokumen kcsanggupan negara donor untuk membiayai (<i>green book</i>)	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)),	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4 Pegawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5	6	7
	3. Dokumen Memorandum of Understanding (MoU) dan dokumen sejenisnya	Terbatas	Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pegawas internal (Inspektorat) /	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4 eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5	6	7
	4. Dokumen Loan Agreement Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Legal Opinion, Perjanjian Pencrusan, Pinjaman dan Surat Menyurat dengan Lender	Terbatas	Pentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), &	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			<p>penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>			
	5. Alokasi dan relokasi penggunaan dana pinjaman/hibah luar negeri	Terbatas	<p>Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat</p>	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>6. Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berikut lampirannya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Reimbursement</i> b. <i>Direct Payment/ Transfer Procedure</i> c. <i>Special Commitment L/C Opening</i> d. <i>Special Account/ Imprest Fund</i> e. Dokumen Pengesahan atas Penerimaan Hibah Luar Negeri f. <i>Notice of Disbursement</i> 	<p>Terbatas</p>	<p>Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p> <p>Pencentu kebijakan (Pcjabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	<p>Pejabat Administrator (Esclon III)</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN</p>	<p>Bagian Keuangan - Biro Umum</p>

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	7. Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>)	Terbatas	Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum
	8. Realisasi pencairan dana pinjaman/Hibah Luar Negeri yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana	Terbatas	Pencentu kebijakan (Pejabat	Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Keuangan -

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p>2</p> <p>(SP2D), SPM beserta lampirannya, antara lain: SPP, Kontrak, Berita Acara dan data pendukung</p>	3	<p>4</p> <p>Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	5 (Esclon III)	6 mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	7 Biro Umum
	<p>9. Replenishment (permintaan penarikan dana dari negara donor) meliputi: No Objection Letter (NOL), <i>Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)</i>,</p>	Terbatas	<p>Pententu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana</p>	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2 <i>Statement of Expenditure (SE)</i>	3	4 Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5	6 fungsi dan tugas BAPETEN	7
10. <i>Staff Appraisal Report</i>		Terbatas	Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4 Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5	6	7
	11. Report/Laporan yang terdiri dari: a. <i>Progress Report</i> b. <i>Monthly Report</i> c. <i>Quarterly Report</i> d. <i>Final Report/ Completion Report</i>	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)),	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	12. Laporan Hutang Negara a. Laporan Pembayaran Hutang Negara b. Laporan Posisi Hutang Negara	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Escion III), Pengawas internal (Inspektorat) /	Pejabat Administrator (Escion III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4 eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5	6	7
	13. Ketentuan/Peraturan yang menyangkut pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Escion III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), &	Pejabat Administrator (Escion III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
D	PENGELOLAAN APBN/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)					
	Keputusan Pengguna Anggaran tentang penciptaan: 1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Kuasa Pengguna Barang/Jasa 3. Pejabat Pembuat Komitmen 4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji 5. Pejabat Penandatanganan SPM 6. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran 7. Pengelola Barang 8. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) 9. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) 10. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>11. Panitia Penerimaan Barang dan Jasa termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan</p>	3	4	5	6	7
E SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)						
	1. Manual implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator	Pejabat Administrator (Escalon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4 (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5	6	7
	2. Kebijakan Akuntansi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4 (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5	6	7
	3. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	Terbatas	Pententu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4 (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5	6	7
	4. Laporan Realisasi Sementara APBN	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Peleaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4 (Aparat Kepolisian, Kcjaksanaan, KPK)	5	6	7
F PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA						
	1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat / eksternal (BPK/BPKP), &	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			<p>penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>			
	2. Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	Terbatas	<p>Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat</p>	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4 Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5	6	7
	3. Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional: a. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) b. MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan) c. Tindak Lanjut/Tanggapan LHP	Terbatas	Pentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian,	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	4. Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara a. Tuntutan Perbendaharaan b. Tuntutan Ganti Rugi	Terbatas	Kejaksanaan, KPK) Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksanaan, KPK)	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF KEPEGAWAIAN (PNS DAN PEJABAT NEGARA)

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p>2</p> <p>1. Kebijakan di bidang manajemen kepegawaian</p> <p>a. Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik</p> <p>b. Penyusunan kebijakan</p> <p>c. Perumusan kebijakan</p> <p>d. Pemberian masukan dan dukungan</p> <p>e. Pentetapan kebijakan</p> <p>f. Peraturan Bersama/Memorandum of Understanding</p>	<p>3</p> <p>Terbatas</p>	<p>4</p> <p>Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	<p>5</p> <p>Pejabat Administrator (Esclon III)</p>	<p>6</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN</p>	<p>7</p> <p>Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum</p>

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>2. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara</p> <p>a. Perencanaan kebutuhan ASN</p> <p>1) Bahan penyusunan rencana kebutuhan</p> <p>2) Analisis kebutuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aparatur Sipil Negara - Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPNNS) <p>3) Pengolahan data kebutuhan</p> <p>b. Perencanaan Pertimbangan Formasi</p> <p>c. Penetapan kebutuhan Aparatur Sipil Negara</p> <p>d. Standarisasi Jabatan</p>	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	7 Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum
	<p>3. Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN)</p> <p>a. Formasi ASN</p>	Biasa /	Umum	Pejabat	Tidak memiliki	Bagian Tata

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usulan dari Unit Kerja - Usul Permintaan Formasi kepada Menpan dan RB serta Kepala BKN - Persetujuan Formasi dari Menpan dan RB - Penetapan Formasi - Penetapan Formasi Khusus 	<p style="text-align: center;">3</p> <p>Terbuka</p>	<p style="text-align: center;">4</p>	<p style="text-align: center;">5</p> <p>Administrator (Esclon III)</p>	<p style="text-align: center;">6</p> <p>dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN</p>	<p style="text-align: center;">7</p> <p>Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum</p>
	<p>b. Pengadaan ASN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proses rekrutmen ASN <ul style="list-style-type: none"> - Pengumuman - Seleksi administrasi - Pemanggilan peserta tes - Pelaksanaan ujian tertulis - Keputusan hasil ujian - Wawancara 2) Penetapan Pengumuman Kelulusan 3) Berkas lamaran yang tidak diterima 	<p>Biasa / Terbuka</p>	<p>Umum</p>	<p>Pejabat Administrator (Esclon III)</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN</p>	<p>Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum</p>

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>4) Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP</p> <p>5) Nota Usul Pengangkatan CASN Menjadi ASN lebih 2 Tahun</p> <p>6) Nota Usul Pengangkatan ASN</p> <p>7) Berkas Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi)</p>					
	<p>4. Pengembangan karier</p> <p>a. Usulan tugas belajar/ ijin belajar/ Diklat/ /kursus/ magang/ ujian dinas/Praktek kerja dari instansi lain</p> <p>1) Perencanaan dan penyusunan analisis kebutuhan</p> <p>2) Pelaksanaan</p> <p>3) Pelaporan</p> <p>4) Ijazah/ Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL/ Sertifikat)</p>	Biasa/ Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escalon III)	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>b. Usulan penyesuaian ijazah</p> <p>c. Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Ijin</p> <p>d. Laporan kegiatan pengembangan diri</p> <p>e. Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja</p> <p>f. Angka Kredit</p> <p>1) Pengajuan daftar usul penctapan angka kredit</p> <p>2) Penilaian daftar usul penctapan angka kredit</p> <p>g. Pakta Integritas Pegawai</p> <p>h. Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)</p> <p>i. Disiplin Pegawai</p> <p>j. Daftar hadir</p> <p>k. Rekapitulasi daftar hadir</p> <p>l. Berkas Hukuman Disiplin</p>	3	4	5	6	7
		Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang dapat	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian -

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	m. Penghargaan dan Tanda Jasa				mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Biro Umum
	5. Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai	Terbatas	Pencentu kebijakan (Pcjabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pcjabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	6. Mutasi Pegawai a. Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Unit Kerja, Mutasi antar Perwakilan, Pemindahan Sementara - Nota Persetujuan/ Pertimbangan Kepala BKN	Terbatas	Kepolisian, Kejaksaan, KPK) Pentu kebijakan (Pjabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pjabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian,	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Kejaksanaan, KPK)				
	b. Mutasi Keluarga 1) Surat ijin pernikahan/perceraian 2) Surat penolakan ijin pernikahan/perceraian 3) Akta nikah/cerai 4) Akta kelahiran anak 5) Surat keterangan meninggal dunia c. Usul Kenaikan Pangkat/ Golongan/ Jabatan d. Usul Pengangkatan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/ Fungsional e. Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/ Status/ Kedudukan Hukum Pegawai f. Peninjauan Masa Kerja g. Berkas Baperjakat 1) Sebelum pelantikan pejabat	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum
		Rahasia	Pententu kebijakan (Pejabat	Jabatan Pimpinan	Menimbulkan kerugian yang	Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Pimpinan Tinggi), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Tinggi	serius terhadap privacy.	
	2) Setelah Pelantikan pejabat	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum
	7. Administrasi Pegawai					
	a. Surat Perintah Dinas/ Surat Tugas b. Cuti Besar c. Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4 Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> d. Cuti Alasan Penting e. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) f. Dokumentasi Identitas Pegawai g. Usul pencetakan Kartu Pegawai/ KPE/ Karis/ 	Terbatas	Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>Karsu</p> <p>h. Keanggotaan Organisasi Profesi / Kedinasan</p> <p>i. Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)/ SPT Tahunan/ NPWP</p> <p>j. Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)</p> <p>k. Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)</p>	3	<p>4</p> <p>Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	5	6	7
	<p>8. Kescjahteraan Pegawai</p> <p>a. Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai</p> <p>b. Berkas tentang Bimbingan Rohani Pegawai</p> <p>c. Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai</p> <p>d. Berkas tentang Layanan Tabungan</p>	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>Perumahan</p> <p>c. Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial</p> <p>f. Berkas tentang Layanan Rekreasi, Kesenian dan Olahraga</p> <p>g. Berkas tentang Layanan Beras</p> <p>h. Berkas tentang Layanan Pengurusan Jenazah</p> <p>i. Berkas tentang Layanan Antar Jemput</p> <p>j. Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas</p>	3	4	5	6	7
	<p>9. Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun</p>	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) /	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4 eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5	6	7
	10. Perselisihan/ Sengketa Kepegawaian	Terbatas	Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Esclon III)), Pengawas internal (Inspektorat / eksternal (BPK/BPKP), &	Pejabat Administrator (Esclon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4 penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5	6	7
	11. Usul Pemberhentian Pegawai dan Penetapan Pensiun Pegawai/ Janda/Duda dan PNS yang tewas	Terbatas	Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Escelon III)), Pengawas internal (Inspektorat / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Escelon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	12. Berkas Perscorangan PNS <ul style="list-style-type: none"> - Lamaran yang diterima - Nota Penetapan NIP dan kelengkapannya - Nota Persetujuan/ Pertimbangan Kepala BKN 	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escelon III)	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum dan Personal Pegawai
	<ul style="list-style-type: none"> - SK Pengangkatan CPNS - Hasil Pengujian Kesehatan - SK Pengangkatan PNS - SK Kenaikan Pangkat - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/ Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan 	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escelon III)	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum dan Personal Pegawai

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Pelantikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK Pengangkatan Dalam atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional - SK Perpindahan Wilayah Kerja - SK Perpindahan Antar Instansi - SK Peninjauan Masa Kerja - SK Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) - Berita Acara Pemeriksaan - SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS - SK Perbantuan/ Dipekerjakan di Luar Instansi Induk - SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/ Dipekerjakan 					

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p style="text-align: center;">2</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK Pemberian Uang Tunjagu - SK Pemberhentian Sebagai PNS - SK Pemberhentian/ Pembebasan Sementara - SK Pengangkatan/ Pemberhentian sebagai Pejabat Negara - SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena Diangkat sebagai Pejabat Negara - SK Pengalihan PNS+C636 - Surat Keterangan Pernyataan Hilang - Surat Keterangan Kembalinya PNS yang Dinyatakan Hilang - SK Penggantian Nama - Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran 	3	4	5	6	7

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	<p data-bbox="505 1634 521 1659">2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="537 1659 553 1908">- Akta Nikah/ Cerai <li data-bbox="570 1697 586 1908">- Akta Kelahiran <li data-bbox="602 1622 618 1908">- Isian Formulir PUPNS <li data-bbox="634 1348 732 1908">- Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji PNS dan Jabatan <li data-bbox="846 1385 862 1908">- Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol <li data-bbox="878 1472 894 1908">- Surat Keterangan Meninggal Dunia <li data-bbox="911 1485 927 1908">- Surat Keterangan Mutasi Keluarga <li data-bbox="943 1385 959 1908">- Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan <li data-bbox="976 1348 1073 1908">- Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional <li data-bbox="1089 1385 1105 1908">- Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus <li data-bbox="1122 1360 1138 1908">- Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala <li data-bbox="1154 1360 1170 1908">- Surat Tugas/Ijin Belajar Dalam/Luar Negeri 	3	4	5	6	7

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Ijin Bepergian ke Luar Negeri - Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS - Kartu Induk Pegawai - Ijasah/Sertifikat - SK Penempatan/Penarikan Pegawai - SK Pengangkatan pada Jabatan Kedinasan di luar Instansi induk 					
	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pertimbangan Status PNS - SK Pengaktifan Kembali sebagai PNS - Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah - SK Pensiun 	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Escion III)	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum dan Personal Pegawai
13.	Berkas Perscorangan Kepala BAPETEN	Terbatas	Pencentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi),	Pejabat Administrator (Escion III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian -

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4 Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	5	6 tugas dan fungsi	7 Biro Umum dan Personal Kepala BAPETEN

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JAZI EKO ISTYANTO